



KERJA SAMA ANTARDESA MENDUKUNG REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI



2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



KERJA SAMA ANTARDESA MENDUKUNG REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

**HASIL KAJIAN
2021**



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Kerja Sama Antardesa Mendukung Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Penanggungjawab

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

Koordinator

Mohamad Ihsan, S.E., M.M.

Penulils

Ir. Lis Purbandini

Dr. Saraswati Soegiharto, M.A.

Dr. Anharudin, M.Si.

Siti Fatimah, S.Sos.

Ir. Haryati

Mohammad Ihsan, S.E., M.M.

Jumiatus, S.E., M.M.

Jaenudin, S.E., M.Si.

Ragil

Desain Cover dan Tata Letak

Fauzan Aidinul Hakim, S.Si.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2022

Diterbitkan Oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

ISBN Dicetak oleh Percetakan

Isi diluar tanggung jawab percetakan



SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Revitalisasi pembangunan kawasan transmigrasi selama ini masih cenderung dilakukan melalui pembangunan infrastruktur fisik. Masyarakat desa pada kawasan transmigrasi yang telah ada belum sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia, persoalan sosial dan budaya/adat, keterbatasan keuangan, sumberdaya, dan sarana prasarana desa dan kawasan. Padahal dalam proses pembangunan kawasan transmigrasi peran masyarakat sebagai subyek pembangunan sangat menentukan keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Untuk itu, salah satu strategi dalam peningkatan pembangunan kawasan transmigrasi yang perlu dikembangkan adalah peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan budaya masyarakat.

Dalam pengembangan kawasan transmigrasi, kerjasama antar desa belum banyak dilihat sebagai pendekatan dalam revitalisasi kawasan transmigrasi. Oleh karena itu kerjasama antar-desa untuk revitalisasi kawasan transmigrasi perlu menjadi perhatian, ditinjau dari sudut pandang modal sosial. Kajian ini, bertujuan untuk mengidentifikasi kerjasama inter dan antar-desa di kawasan transmigrasi; menganalisis kendala/permasalahan kerjasama inter dan antar-desa di kawasan transmigrasi; dan untuk menyusun strategi pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi.

Laporan ini akan mengupas tentang bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kawasan transmigrasi dan strategi pemanfaatan kerjasama sebagai

Sambutan

modal untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

NIP.19710819 199201 1 003

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

KETUA TIM KAJIAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga buku berjudul Kajian Kerjasama Antar Desa Mendukung Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan latar belakang bahwa Renstra Pembangunan Bidang Ketransmigrasian 2020-2024 (Kemendesa PDTT, 2020), salah satu sasaran strategis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi selama 5 (lima) tahun yaitu terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan dalam mendukung pertumbuhan wilayah yakni meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satunya yaitu dengan peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan budaya untuk pembangunan perdesaan agar sasaran Renstra dapat terwujud.

Sementara didalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerjasama antar-desa merupakan salah satu kebijakan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan perdesaan. Dalam pengembangan kawasan transmigrasi, kerjasama antar desa belum banyak dilihat sebagai pendekatan dalam revitalisasi kawasan transmigrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk merumuskan strategi pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi. Laporan ini memuat 6 (enam) Bab yang terdiri dari Bab I tentang urgensi kerjasama antar desa untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi, Bab II berisi kerangka teori, Bab III membahas tentang pembelajaran korporasi tani mulus di Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, Bab IV tentang kerjasama di kawasan

transmigrai, Bab V Strategi pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial dan ditutup dengan BAB VI yang memuat Kesimpulan dan Saran .

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat.

Ir. Lis Purbandini

NIP.19650218 199103 2 001

Ketua Tim Kajian Kerjasama Antardesa Mendukung Revitalisasi
Kawasan Transmigrasi

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. PERTANYAAN PENELITIAN.....	3
1.3. TUJUAN PENELITIAN	3
1.4. SASARAN.....	3
1.5. RUANG LINGKUP	4
1.6. METODE PENELITIAN.....	4
2. KERANGKA TEORI	7
2.1. LANDASAN TEORI.....	7
2.1.1. KONSEP MODAL SOSIAL	7
2.1.2. KERJASAMA ANTAR DESA	10
2.1.3. REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI.....	13
2.1.4. KORPORASI PETANI	18
2.2. PERAN MODAL SOSIAL DAN PEMANFAATANNYA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	21
2.3. ALUR PIKIR PENELITIAN	23

3. PEMBELAJARAN KORPORASI TANI MULUS EMAS, KECAMATAN CIKEDUNG, KABUPATEN INDRAMAYU. .	27
3.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIKEDUNG, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT	27
3.2. KOPERASI GAPOKTAN TANI MULUS EMAS	29
3.3. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN KORPORASI PETANI	30
3.3.1. FAKTOR PENDORONG	30
3.3.2. FAKTOR PENGHAMBAT	31
3.4. PRAKTIK BAIK KORPORASI PETANI.....	32
4. KERJASAMA DI KAWASAN TRANSMIGRASI	37
4.1. GAMBARAN UMUM KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) CAHAYA BARU	37
4.1.1. LETAK ADMINISTRATIF KTM CAHAYA BARU	37
4.1.2. POLA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN.....	39
4.1.3. SARANA DAN PRASARANA.....	40
4.2. BENTUK KERJASAMA SEBAGAI MODAL SOSIAL DI DESA KARANG BUNGA, KECAMATAN MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA.....	41
4.2.1. BENTUK KERJASAMA	41
4.2.1.1. Grup dan Jaringan/Kelompok Masyarakat.....	41
4.2.1.2. Kepercayaan dan Solidaritas.....	47
4.2.1.3. Aksi dan Kerjasama Kolektif	48
4.2.2. AKTIVITAS KERJASAMA	49
4.3. DESA SAMUDA, KECAMATAN BELAWANG, KABUPATEN BARITO KUALA.....	52
4.3.1. BENTUK KERJASAMA	52
4.3.1.1. Group dan Jaringan/Kelompok Masyarakat.....	52
4.3.1.2. Kepercayaan dan Solidaritas.....	56
4.3.1.3. Aksi dan Kerjasama Kolektif	57
4.3.2. AKTIVITAS KERJASAMA	58
4.4. KENDALA DAN SOLUSI KERJASAMA.....	61
5. STRATEGI PEMANFAATAN KERJASAMA SEBAGAI MODAL SOSIAL UNTUK Mendukung Revitalisasi KAWASAN TRANSMIGRASI	65

5.1. LEVEL KERJASAMA DI KAWASAN TRANSMIGRASI	65
5.1.1. <i>BONDING</i>	66
5.1.2. <i>BRIDGING</i>	67
5.1.3. <i>LINKING</i>	67
5.2. STRATEGI PEMANFAATAN KERJA SAMA ANTAR DESA SEBAGAI MODAL SOSIAL Mendukung REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI	69
5.2.1. PEMETAAN BENTUK KERJASAMA	70
5.2.2. MENGAKTIVASI/MENGOPERASIONALKAN MODAL SOSIAL YANG ADA DI KAWASAN TRANSMIGRASI	71
5.2.2.1. Dokumen Perencanaan	71
5.2.2.2. Pelatihan	72
5.2.2.3. Pendampingan	73
5.2.2.4. Peningkatan Kreativitas Sosial Budaya	74
5.2.2.5. Pelibatan Pelaku Budaya	75
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
6.1. KESIMPULAN	77
6.2. REKOMENDASI	81
Daftar Pustaka	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Arah kebijakan dan Strategi Revitalisasi Kawasan Transmigrasi.....	15
Tabel 2.	Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Cikedung, Tahun 2019	28
Tabel 3.	Pola Ruang KTM Cahaya Baru.....	39
Tabel 4.	Penggunaan Lahan di Wilayah KTM Cahaya Baru	40
Tabel 5.	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Aktivasnya Di Desa Karang Bunga Berdasarkan Bidang	42
Tabel 6.	Aktivitas Kerjasama di Desa Karang Bunga	50
Tabel 7.	Kelompok Masyarakat yang ada di Desa Samuda	53
Tabel 8.	Aktivitas Kerjasama di Desa Samuda.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian	25
Gambar 2. Peta Kecamatan Cikedung	28
Gambar 3. Konfigurasi Korporasi Petani Cikedung (Kecamatan Cikedung, Indramayu).....	34
Gambar 4. Peta Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru.....	38

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang No. 29 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan lainnya membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Berbasis kawasan dimaknai bahwa kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan (Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian).

Selama periode pembangunan tahun 2020-2024, pemerintah (cq Kemendesa PDTT) merencanakan melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi dalam rangka mempersiapkan kawasan tersebut menjadi berdaya saing. Sebagaimana tercantum dalam Renstra Pembangunan Bidang Ketransmigrasian 2020-2024 (Kemendesa PDTT, 2020), sasaran

strategis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi selama 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan dalam mendukung pertumbuhan wilayah yakni meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi. Terdapat 152 kawasan transmigrasi prioritas yang akan direvitalisasi dalam pembangunan transmigrasi, yang terdiri dari 52 kawasan prioritas nasional dan 100 kawasan prioritas kementerian. Dari 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional terdapat 24 kawasan dengan status perkembangan mandiri dan 28 status berkembang. Sedangkan 100 kawasan prioritas kementerian status perkembangan kawasannya 14 mandiri dan 86 berkembang.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, telah disusun arah kebijakan pembangunan transmigrasi 2020-2024, yaitu (1) penyediaan dan pelayanan pertanahan, (2) pembangunan kawasan transmigrasi, (3) peningkatan sumberdaya manusia yang unggul, (4) pengembangan usaha ekonomi transmigrasi, (5) pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital, (6) peningkatan keberlanjutan pembangunan kawasan transmigrasi, (7) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan budaya untuk pembangunan perdesaan dan (8) peningkatan sinergitas pembangunan transmigrasi antar K/L/D/M.

Selama ini revitalisasi pembangunan kawasan transmigrasi masih cenderung dilakukan melalui pembangunan infrastruktur fisik. Masyarakat desa pada kawasan transmigrasi yang telah ada belum sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia, persoalan sosial dan budaya/adat, keterbatasan keuangan, sumberdaya, dan sarana prasarana desa dan kawasan. Padahal dalam proses pembangunan kawasan transmigrasi peran masyarakat sebagai subyek pembangunan sangat menentukan keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Untuk itu arah kebijakan pembangunan transmigrasi ke tujuh yaitu peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan yang salah satu strateginya adalah melalui memanfaatkan modal sosial dan budaya untuk peningkatan pembangunan kawasan

transmigrasi perlu dikembangkan agar sasaran Renstra dapat terwujud.

Dalam pembangunan desa, sebagaimana pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerjasama antar-desa merupakan salah satu kebijakan untuk mendorong perkembangan perekonomian kawasan perdesaan. Dalam pengembangan kawasan transmigrasi, kerjasama antar desa belum banyak dilihat sebagai pendekatan dalam revitalisasi kawasan transmigrasi. Padahal kerjasama antar-desa merupakan salah satu bentuk dari modal sosial, yang mana dalam Rencana Strategis Kemendesa 2020-2024 pemanfaatan modal sosial telah ditetapkan sebagai arah kebijakan pembangunan transmigrasi. Oleh karena itu kerjasama antar-desa untuk revitalisasi kawasan transmigrasi perlu menjadi perhatian, ditinjau dari sudut pandang modal sosial.

1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kawasan transmigrasi?
2. Bagaimana memanfaatkan kerjasama sebagai modal sosial untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi kerjasama inter dan antar-desa di kawasan transmigrasi
2. Menganalisis kendala/permasalahan kerjasama inter dan antar-desa di kawasan transmigrasi
3. Menyusun strategi pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi

1.4. SASARAN

Sasaran penelitian ini adalah tersedianya rumusan strategi pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi.

1.5. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini kerjasama yang dianalisis dibatasi pada:

1. Kerjasama inter dan antar-desa dalam satu Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) pada sebuah kawasan transmigrasi, baik pada level *bonding*, *bridging* dan *linking*.
2. Kerjasama antar-desa yang dikaji dibatasi pada 2 (dua) desa dalam satu SKP di kawasan transmigrasi

1.6. METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara menggambarkan (mendeskripsikan) dan menjelaskan (eksplanatory) fenomena sosial (kerjasama) yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan maksud bukan saja untuk menggambarkan modal sosial (kerjasama inter dan antar desa di dalam kawasan transmigrasi), tetapi juga menjelaskan bagaimana pentingnya pemanfaatan modal sosial dan bagaimana mengelola dan merekayasa modal sosial tersebut untuk tujuan pengembangan (revitalisasi) kawasan transmigrasi.
2. Data yang akan dihimpun adalah data primer dan sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan informan di lapang, diikuti dengan wawancara lanjutan melalui media teknologi (telepon/ *videocall/zoom meeting*). Informan terdiri dari pendamping kawasan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha.
3. Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka/dokumen seperti peraturan-peraturan, laporan-laporan dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan substansi penelitian.
4. Lokus penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan kawasan transmigrasi yang menjadi target program Kementerian tahun 2021, yaitu revitalisasi kawasan transmigrasi dan Kerjasama Antar Desa di kawasan perdesaan. Lokasi terpilih adalah di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala (Provinsi Kalimantan Selatan), yaitu:

- Desa Karang Bunga (Kecamatan Mandastana)
- Desa Samuda (Kecamatan Mandastana)

5. Kaji Banding

Untuk mendukung analisis, dilakukan kaji banding pada lokasi di kawasan sentra produksi di mana terdapat program pengembangan korporasi petani. Kasus ini dipelajari dengan pertimbangan adanya program nasional pengembangan sentra produksi pangan (*food estate*) berbasis korporasi petani, baik di desa-desa di luar kawasan transmigrasi maupun di dalam kawasan transmigrasi, dan konsep korporasi petani mengandung aspek kerjasama. Adapun lokasi kaji banding adalah Korporasi Tani Mulus Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat).

6. Teknik Analisis

Data yang telah dihimpun diolah dan dianalisis (diinterpretasi) sesuai tema dan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang diklasifikasikan menjadi:

- Bentuk modal sosial, meliputi jejaring, kepercayaan, norma sosial
- Level modal sosial, meliputi *bonding*, *bridging*, *linking*
- Pemanfaatan modal sosial untuk revitalisasi kawasan transmigrasi

2

KERANGKA TEORI

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. KONSEP MODAL SOSIAL

Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumberdaya penghidupan masyarakat atau yang sering disebut dengan lima asset/modal masyarakat yaitu modal manusia (*human capital*), modal alam (*natural capital*), modal ekonomi atau keuangan (*financial capital*), modal fisik buatan manusia (*infrastructure/physical/man-made capital*), dan modal sosial-budaya (*social capital*). Kelima modal tersebut saling melengkapi untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat ketika terjadi guncangan terhadap sistem penghidupan (Saraswati Soegiharto dan Arif Purbantara, 2020).

Secara umum modal sosial didefinisikan sebagai informasi, kepercayaan, dan norma-norma timbal-balik yang melekat dalam suatu sistem jaringan sosial (Saharudin, 2000: 20). Dalam konteks kehidupan masyarakat, konsep modal sosial dapat menjelaskan berbagai relasi sosial dan norma yang bekerja dalam suatu struktur sosial untuk melihat perkembangan suatu masyarakat.

Menurut Robert M.Z. Lawang (2005) prinsip dasar dalam konsep *capital social* ada 3 (tiga), yaitu kepercayaan, jaringan dan norma. Kepercayaan dimaknai sebagai suatu proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya. Terdapat 3 (tiga) hal yang terkait dalam kepercayaan antar-manusia, yaitu: (1) hubungan sosial antara 2 (dua) orang atau lebih, (2) harapan yang terkandung dalam hubungan tersebut tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak apabila direalisasikan, dan (3) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan tersebut dapat terwujud. Jaringan terbentuk karena adanya ikatan kerja antar-simpul yang dihubungkan dengan media sosial/hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan baik dalam bentuk strategik atau moralistik. Kepercayaan ini dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Dalam jaringan antar institusi terdapat 3 (tiga) bentuk jaringan yaitu (1) *Bonding* apabila kerjasama terjadi pada level yang sama/setara dalam satu wilayah, (2) *Bridging* apabila kerjasama terjadi pada level yang sama antar-wilayah, dan (3) *Linking* apabila kerjasama terjadi pada antar-kawasan atau dengan pihak lain yang memberikan keuntungan dalam melakukan kerjasama. Norma tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan dan jaringan. Struktur jaringan yang sudah terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara 2 (dua) orang maka sifat norma: (1) Norma akan muncul apabila pertukaran menguntungkan kedua belah pihak, (2) Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari satu kegiatan tertentu, (3) Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata akan memunculkan norma keadilan, apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Putnam (1995) dalam Arif Purbantara dkk (2019) menyebutkan modal sosial sebagai hubungan antara individu-individu, jaringan sosial, norma-norma timbal balik, kepercayaan, dan difasilitasi oleh adanya koordinasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial bukan sebatas hubungan interaksi yang melibatkan faktor perilaku orang tertentu saja, tetapi juga dapat melibatkan individu dalam kelompok-kelompok yang membentuk suatu jaringan sosial. Hal ini sejalan dengan

pendapat Djohan (2007) yang mengatakan modal sosial adalah keadaan yang membuat masyarakat atau sekelompok orang bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam prosesnya, gerakan itu ditopang oleh nilai dan norma yang khas, yaitu *trust*, saling memberi dan menerima, toleransi, penghargaan, partisipasi, kerja sama, dan proaktif serta nilai-nilai positif yang dapat membawa kemajuan bersama.

Peran modal sosial, yang merupakan bagian dari modal masyarakat, masih sedikit terlibat bahkan seringkali diabaikan dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Akibatnya program pembangunan yang dilaksanakan di desa belum membuahkan hasil yang optimal dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, begitu juga sebaliknya. Migdley (2005, dalam Arif Purbantara dkk, 2019), menjelaskan bahwa di dalam proses pembangunan, pembangunan sosial dan ekonomi membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak akan berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial pada masyarakat secara menyeluruh.

Pada tataran lapang, modal sosial yang terdapat di desa diantaranya berupa peraturan desa tentang pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes), kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, PKK, Karang Taruna, lembaga desa di mana seseorang berpartisipasi dan memperoleh dukungan untuk kelangsungan hidupnya, seperti lembaga musyawarah desa, lembaga kerjasama desa, dan tradisi gotong-royong. Modal sosial dapat berdampak langsung terhadap modal lainnya melalui akses ke sumberdaya dan barang milik umum. Jejaring sosial memfasilitasi inovasi, perolehan pengetahuan, dan pertukaran semua ini (Saraswati Soegiharto dan Arif Purbantara, 2020).

2.1.2. KERJASAMA ANTAR DESA

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi/jejaring sosial. Menurut Abdulsyani (1994), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan kerjasama perlu disepakati oleh kedua belah pihak lingkup kegiatan yang akan dikerjasamakan. Tujuan kerja sama desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Nur Ariyanto, 2020).

Konsep kerjasama tersebut diaplikasikan pada perihal kerjasama desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 91, yang menyebutkan bahwa Desa dapat mengerjakan kerjasama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga. Kerja sama antar-desa dapat dilakukan antara desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Sedangkan untuk kerja sama desa dengan pihak ketiga, dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah instansi pemerintah, perguruan tinggi, swasta atau perorangan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.

Dalam kerjasama terdapat tiga unsur pokok yang selalu melekat yaitu unsur dua pihak atau lebih; unsur interaksi dan unsur tujuan kerjasama. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak termuat pada suatu obyek yang dikaji, maka dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerjasama. Dengan demikian, terlihat ada dua skenario yang kemungkinan akan terjadi dalam regionalisasi dengan pola kerjasama regional yaitu: apakah masing-masing daerah akan bekerjasama untuk kepentingan bersama. atau malahan saling bersaing untuk memajukan daerahnya masing-masing (Djoko Puguh W, 2017)

Beberapa alasan penting perlunya kerjasama antar-desa menurut Dirjen. PPMD (2015, dalam Nur Ariyanto, 2020), antara lain:

1. Potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi desa tidak selalu sama antar desa yang satu dengan desa lainnya. Demikian pula relasi masyarakat antar desa dapat terjalin dengan baik, atau sebaliknya, terdapat gejala-gejala perselisihan atau konflik.
2. Desa-desanya ke depan sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Khusus dalam hal energi, desa yang tidak mampu dan tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara mandiri. Maksud dari sistem pemenuhan kebutuhan dasar adalah cara atau mekanisme pemenuhan kebutuhan melalui kerja sama antar desa atau kemitraan dengan pihak ketiga.
3. Tuntutan pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan pada penyesuaian tata kelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*).
4. Program-program pembangunan seringkali menciptakan ketergantungan masyarakat desa atau desa pada penyelenggara program. Kerja sama dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lintas desa dalam memperkuat kemandiriannya sebagai subjek pembangunan.

Untuk mencapai keberhasilan kerjasama, selain prinsip *good governance* (trasparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektifitas, konsensus), beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut (Djoko Puguh W, 2017):

1. Dibentuk melalui pendekatan dari bawah melalui inisiasi lokal dengan menggunakan prinsip 3 K (Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi)
2. Dibangun untuk kepentingan umum
3. Kerjasama tidak bersifat hirarkis melainkan merupakan jejaring kelembagaan

4. Keterkaitan yang dijalin didasarkan kebutuhan
5. Kerjasama harus saling memperkuat
6. Kerjasama dibangun harus saling percaya, menghargai, saling memahami

Manfaat kerjasama menurut (Djoko Puguh W, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Membentuk pusat pertumbuhan baru (*economic growth*). Selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, Regional Management diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan pendapatan (ekonomi) masyarakat daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas di daerah-daerah yang bekerjasama sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang baik.
3. Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha konservasi.
4. Meningkatkan sistem pengelolaan wilayah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dalam wilayah.
5. Meningkatkan pengelolaan sektor-sektor potensial yang merupakan potensi unggulan di daerah.
6. Memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
7. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
8. Menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecenderungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh. Di masa mendatang, karena kerjasama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai

suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan maka harus ada upaya yang sistematis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitutionalisasi kerjasama antara daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya.

Dalam melakukan kerjasama lingkup kegiatan yang akan dikerjasamakan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ruang lingkup kerjasama antar-desa meliputi kegiatan atau aktivitas yang akan menjadi obyek kerjasama seperti pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa. Dalam penentuan obyek yang akan dikerjasamakan perlu mengedepankan peran aktif masyarakat desa melalui musyawarah desa sehingga obyek kerjasama merupakan hasil kesepakatan dan merupakan kebutuhan masyarakat desa.

2.1.3. REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) (UU No. 29 tahun 2009). Berdasarkan struktur ruang, kawasan transmigrasi terdiri dari beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan 1 (satu) Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Setiap SKP terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) Satuan Permukiman (SP) dan paling banyak 6 (enam) SP yang salah satu diantaranya disiapkan menjadi desa utama sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL). SP dapat berupa SP – Baru, SP- Pugar dan SP- Tempatan. (UU No. 29 tahun 2009).

Revitalisasi adalah upaya untuk menvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan

aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi (Danisworo, 2002). Selanjutnya menurut Laretna (2002), revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas. Dalam konteks revitalisasi kawasan transmigrasi, pelaksanaannya selama ini masih focus pada pembangunan infrastruktur fisik dan masih sedikit menyentuh pelibatan masyarakat, sehingga pembangunan kawasan ke depan pelibatan/partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2020-2021 akan merevitalisasi kawasan sebanyak 152 kawasan yang terdiri dari 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 100 kawasan prioritas kementerian. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun sejumlah arah kebijakan, meliputi Penyediaan dan Pelayanan Pertanahan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia yang Unggul, Pengembangan Usaha Ekonomi Transmigrasi, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Digital, Peningkatan Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Peningkatan dan Pemanfaatan Modal Sosial Budaya untuk Pembangunan Perdesaan, Peningkatan Sinergitas Pembangunan Transmigrasi antar K/L/D/M. Adapun arah kebijakan dan strategi Revitalisasi Kawasan Transmigrasi disampaikan pada berikut.

TABEL 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penyediaan dan Pelayanan Pertanahan	<p>Penyelesaian permasalahan adanya okupasi/ sengketa dengan masyarakat tempatan, tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, ketidaktersediaan lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan kasus lainnya</p> <hr/> <p>Penyelesaian permasalahan penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan (SK HPL) dan sertifikat hak milik tanah untuk transmigran</p> <hr/> <p>Penyediaan lahan untuk transmigran dan pengurusan hak atas tanah</p> <hr/> <p>Advokasi Pertanahan</p>
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	<p>Perencanaan Kawasan Transmigrasi, termasuk perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakatnya dan meningkatkan Koordinasi dan kolaborasi kebijakan, perencanaan dan tata kelola penganggaran lintas K/L/D/M</p> <hr/> <p>Pembangunan sarana prasarana dasar</p> <hr/> <p>Pembangunan sarana prasarana penunjang</p> <hr/> <p>Pembangunan sarana prasarana utilitas umum untuk meningkatkan konektivitas antar SP/SKP dan kawasan</p>
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia yang Unggul	<p>Peningkatan kompetensi calon transmigran yang disesuaikan kondisi kawasan transmigrasi</p> <hr/> <p>Meningkatkan kapasitas masyarakat kawasan transmigrasi dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi tepat guna untuk pengembangan produk unggulan</p> <hr/> <p>Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan</p>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
4.	Pengembangan Usaha Ekonomi Transmigrasi	<p>Fasilitasi pengelolaan kluster/BUMDES/ BUMDESMA dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan, pembiayaan dan pemasaran</p> <hr/> <p>Mengembangkan sentra produksi serta industri pengolahan hasil pertanian, perikanan serta destinasi pariwisata dalam bentuk kluster</p> <hr/> <p>Mengembangkan kelembagaan kawasan transmigrasi untuk mendorong pengembangan ekonomi local</p> <hr/> <p>Peningkatan kolaborasi stakeholder untuk meningkatkan investasi pemerintah dan dunia usaha</p> <hr/> <p>Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan produksi, pengolahan, pembiayaan dan pemasaran</p>
5.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dan Teknologi Digital	<p>Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi, pembiayaan, pengolahan dan pemasaran</p> <hr/> <p>Integrasi data dan informasi serta penyatuan Indeks perkembangan kawasan transmigrasi, SKP, SP dan KPB</p> <hr/> <p>Pemanfaatan teknologi digital untuk region and product branding</p> <hr/> <p>Pengembangan <i>e-commerce</i> di kawasan transmigrasi yang terpadu dengan wilayah perdesaan lainnya bahkan seluruh Indonesia</p>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
6.	Peningkatan Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Menata ruang kawasan transmigrasi untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
		Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan distribusi hak atas tanah bagi petani dan nelayan
		Meningkatkan akses masyarakat kawasan transmigrasi pada pemenuhan kebutuhan hidup pelayanan dasar
		Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh masyarakat berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
7.	Peningkatan dan Pemanfaatan Modal Sosial Budaya Untuk Pembangunan Perdesaan	Memanfaatkan modal sosial dan budaya untuk peningkatan pembangunan kawasan transmigrasi
		Meningkatkan kapasitas modal sosial budaya masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal
		Pelibatan para pelaku budaya dan masyarakat dalam memanfaatkan modal sosial budaya masyarakat

Sumber: Renstra Bidang Ketransmigrasian 2020-2024 (Kemendesa PDTT, 2020)

Secara eksplisit terlihat adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan sebagai salah satu dari arah kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi (arahan ke 7). Adapun strategi yang akan ditempuh dalam kebijakan ini, meliputi:

1. Memanfaatkan modal sosial dan budaya untuk peningkatan pembangunan kawasan transmigrasi
2. Meningkatkan kapasitas modal sosial budaya masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal
3. Pelibatan para pelaku budaya dan masyarakat dalam memanfaatkan modal sosial budaya masyarakat

4. Meningkatkan kreativitas sosial budaya untuk pembangunan kawasan transmigrasi
5. Meningkatkan kerekatan sosial antar transmigran dan antara transmigran dengan penduduk lokal

Terlihat bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut memerlukan upaya untuk mengaktivasi modal sosial dalam masyarakat. Disinilah letak relevansi pengetahuan mengenai modal sosial dan pemanfaatannya dalam pengembangan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi.

2.1.4. KORPORASI PETANI

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pengembangan Kawasan *Food Estate* (kawasan sentra produksi pangan). Terkait dengan hal tersebut, dan dalam rangka kebijakan pengembangan ketahanan pangan transmigrasi sejumlah kawasan transmigrasi direncanakan menjadi kawasan sentra produksi pangan, meliputi Kawasan Transmigrasi Telang di Sumatera Selatan, Kawasan Transmigrasi Muting dan Kawasan Transmigrasi Salor di NTT, Kawasan Transmigrasi Belitang di Sumatera Selatan dan Kawasan Transmigrasi Dadahup di Kalimantan Tengah (Yuliani, Dewi Yuliani, 2021).

Pengembangan kawasan *food estate* dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, dan diharapkan akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya serta membuka peluang bisnis secara lebih rasional dan efisien. Pengembangan *food estate* akan dikelola secara modern dengan manajemen korporasi petani, dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan banyak pihak, serta dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis berbasis pemberdayaan masyarakat lokal, dengan prinsip inklusif yaitu pendekatan partisipatif, peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan petani, kepemilikan mayoritas petani, dan regenerasi petani. Untuk itu, *Food Estate* akan dilaksanakan dalam skema korporasi petani, terintegrasi dengan skema kredit dan asuransi pertanian, dan memfasilitasi petani dengan jaringan pemasaran daring. Dalam hal ini pengembangan *food estate* akan mengutamakan SDM pemuda setempat, sekolah vokasi pertanian dan perguruan tinggi setempat (Syahyuti, 2021).

Merujuk pada Permentan No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Dalam menumbuh kembangkan korporasi petani, kelembagaan petani perlu melakukan konsolidasi ke dalam kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum pada skala kawasan, penguatan jejaring kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis pertanian, serta prasarana dan sarana pertanian, dan peningkatan akses kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

Bisnis petani dalam korporasi petani meliputi bisnis *on-farm* dan bisnis *off-farm*. Usaha *on-farm* dilakukan oleh petani secara individual. Sementara korporasi petani secara khusus akan mengelola usaha *off-farm*, meliputi “*off-farm* hulu” (usaha produksi dan penjualan benih, penyediaan permodalan, penyediaan pupuk dan obat-obatan, dan pelayanan alsintan), serta “*off-farm* hilir” (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian) (Tim Pengembangan Food Estate, 2010).

Khususnya pada sisi onfarm, para petani perlu ada strategi dalam mengonsolidasikan ke dalam kelompok tani maupun kelompok yang lebih luas, yaitu kelembagaan Korporasi Petani dan KSPP (Kawasan Sentra Produksi Pangan). Mengacu Rencana Induk *Food Estate* (Bappenas 2020), strategi yang diperlukan yaitu:

1. Penumbuhan kelompok tani baru
2. Revitalisasi kelompok tani non aktif
3. Pemetaan kelompok tani aktif
4. Peningkatan kelas kemampuan poktan menjadi madya dan utama
5. Penumbuhan gabungan kelompok tani baru
6. Peningkatan kemampuan gabungan kelompok tani dalam fungsi agribisnis
7. Peningkatan gabungan kelompok tani menjadi kelembagaan ekonomi petani
8. Pembentukan korporasi petani
9. Pembentukan KSPP

Upaya mewujudkan korporasi petani dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan untuk mengaktivasi modal sosial pada masyarakat di desa-desa pertanian. Korporasi petani merupakan sebuah kelembagaan yang melibatkan petani dan kelompok tani yang akan bekerja pada usaha *on-farm*, kelembagaan ekonomi petani yang akan melayani aktivitas dari gabungan kelompok tani pada usaha *off-farm* (hulu-hilir), serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Agar kerjasama berbagai pelaku bisnis berjalan dengan baik, diperlukan adanya norma yang mengatur tugas dari masing-masing pihak yang bekerjasama. Ada unsur *trust*, *network*, dan *norms* dalam kelembagaan korporasi petani tersebut yang diperlukan agar korporasi petani dapat berjalan. Aktivasi modal sosial melalui penumbuhan korporasi petani sebagai sebuah kelembagaan merupakan pendekatan proses, dimulai dari penumbuhan kelompok tani hingga pembentukan KSPP dengan *trust*, *network* dan *norms* sebagai fondasinya. Pendekatan proses digunakan sebagai strategi, terutama dalam mengonsolidasikan kelompok-kelompok tani sebagai bentuk penguatan unsur utama dalam korporasi petani.

2.2. PERAN MODAL SOSIAL DAN PEMANFAATANNYA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Elemen-elemen modal sosial seperti kepercayaan, kohesivitas, altruisme, gotong-royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan (Blakeley dalam Suharto 2005).

Modal sosial sangat diperlukan untuk penguatan kapasitas masyarakat pedesaan guna meningkatkan peran mereka dalam pembangunan pedesaan. Tri Pranaji (2006) menemukan elemen modal sosial yang penting dan strategis untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agro ekosistem lahan kering di desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunung Kidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali, meliputi *value system, human resources or human competence, social management, social organization, social structure, leadership, and good governance*. Desa dengan modal sosial yang lebih kuat, memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengatasi kerusakan lahan. Ketidakmerataan kekuatan modal sosial di antara kampung dalam desa dapat digunakan sebagai indikator kelemahan masyarakat desa dalam pengelolaan lahan kering, sekaligus sebagai indikator lemahnya *civil society dan rural governance*. Studi menyarankan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan lahan kering, perlu dilakukan upaya terintegrasi antara pemberdayaan masyarakat desa dengan transformasi social budaya dan ekonomi pedesaan.

Evi Vitriana dan Marni (2021) menemukan bahwa modal sosial pada transmigran di permukiman transmigrasi di Kabupaten Pulang Pisau potensial untuk mendukung pengembangan program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Modal sosial tersebut adalah: *network, trust, dan social norms*. Sebagai pelaku pertanian, transmigran memerlukan *network* untuk bekerjasama mengembangkan pertanian. Dalam hal *trust*,

program *Food Estate* menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat (petani), yang juga mengindikasikan adanya trust dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian. Dalam hal *social norms*, pada pengembangan program *Food Estate* terdapat sejumlah peraturan legal yang diperlukan untuk pengembangan pertanian.

Pada lingkup wilayah dan kawasan perdesaan, modal sosial juga memberi kontribusi dalam pembangunan. Studi mengenai keterkaitan modal sosial dengan pembangunan ekonomi wilayah yang dilakukan oleh Vipriyanti (2011) menemukan bahwa modal sosial di wilayah belum berkembang lebih rendah daripada di wilayah maju. Namun menurut Vipriyanti, aspek modal sosial seringkali diabaikan pada berbagai keputusan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar-pelaku. Pentingnya peran modal sosial dalam pengembangan wilayah juga disampaikan oleh Suwandi (2006) yang menekankan pada pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan di kawasan agropolitan. Pernyataan dan temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa program-program yang mendorong pembentukan dan pengembangan modal sosial memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.

Peran modal sosial juga ditemukan dalam mendukung inovasi, yang dibutuhkan dalam menciptakan daya saing kawasan transmigrasi. Soogwan Doh dan Zoltan J. Acs (2009) menyebutkan adanya hubungan positif antara modal sosial dan inovasi. Dalam hal ini modal sosial meliputi *institutional trust*, *associational activities*, dan *civic norms*. Modal sosial berinteraksi dengan entrepreneurship, terutama antara kegiatan yang berasosiasi (*associated activities*) dengan entrepreneurship. Temuan ini konsisten dengan kebutuhan untuk membangun relasi sosial/jaringan dalam *networked economy* yang berkembang saat ini. Hasil penelitian ini mendukung tentang pentingnya modal sosial untuk perkembangan ekonomi.

Peran modal sosial juga dapat dikembangkan melalui *collaboration network of information systems (IS)*. Sebagaimana disampaikan oleh Jennifer Xu, Michael Chau, Bernard C. Y. Tan (2014), melalui analisis terhadap lima aspek di bidang *structural social capital*, meliputi: *network ties, network configuration, structural holes, growth, dan structural cohesion*, ditemukan bahwa di bidang saintifik, komunitas IS telah melakukan progress yang signifikan dalam mengakumulasikan modal sosial. Temuan ini diklaim sebanding dengan aspek *networks* yang terdapat pada disiplin ekonomi/bisnis, seperti *management, finance, dan marketing*, dan merekomendasikan bahwa komunitas IS dapat meningkatkan peran modal sosial yang dapat memfasilitasi penciptaan pengetahuan dan inovasi (*knowledge creation and innovation*).

Pentingnya modal sosial dalam pembangunan tidak terbantahkan, baik pada pembangunan pedesaan maupun pada pengembangan ekonomi berbasis teknologi informasi. Namun pemanfaatan modal sosial oleh pemerintah untuk pembangunan masih sedikit mengingat banyak kesulitan yang inheren dalam praktik pengembangan kebijakan, diantaranya adalah luasnya cakupan modal sosial yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, tipe dan level. Oleh karenanya untuk mengembangkan bentuk programatiknya harus memperhatikan dan memahami karakter modal sosial.

2.3. ALUR PIKIR PENELITIAN

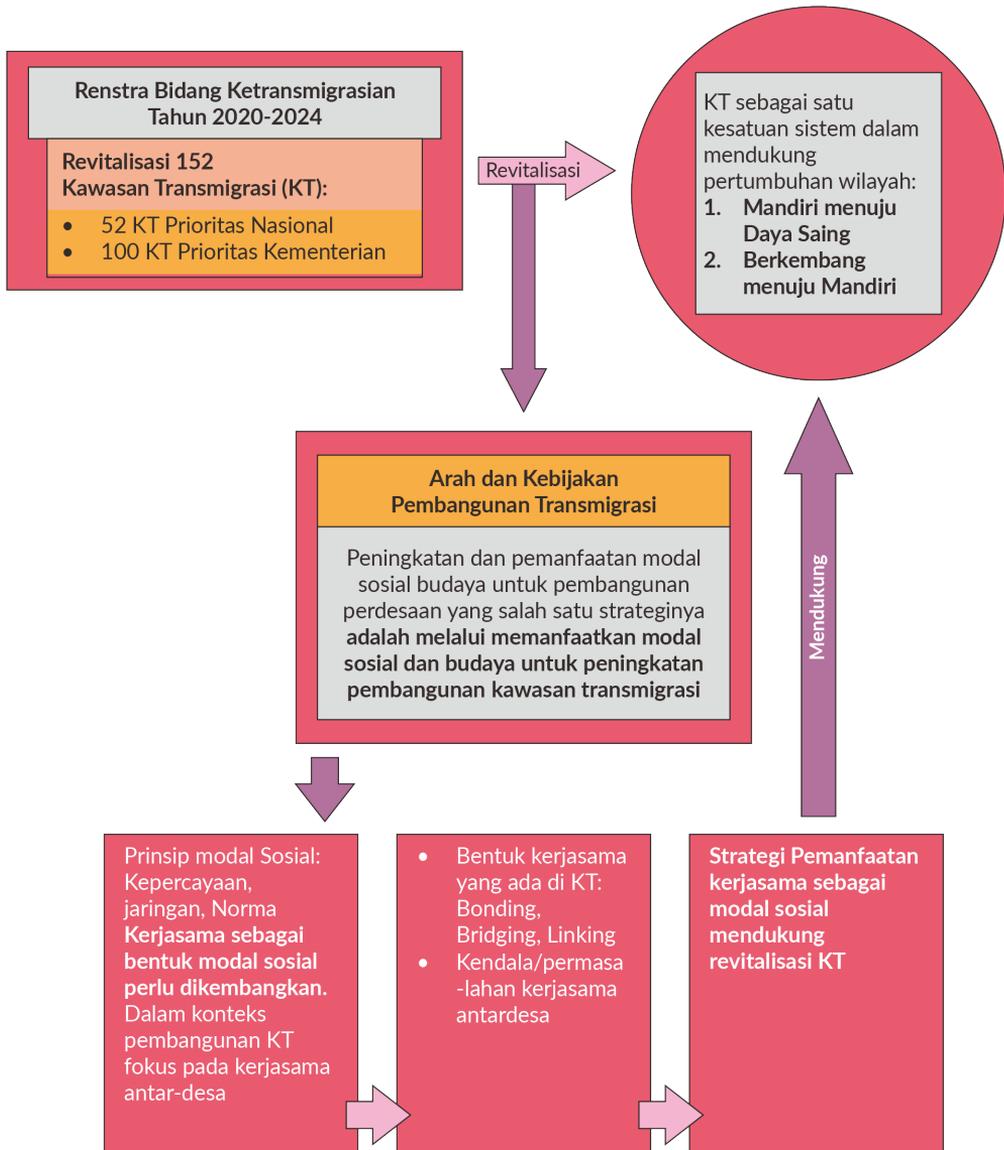
Target Renstra Bidang Ketransmigrasian tahu 2020-2024 merevitalisasi 152 kawasan yang terdiri dari 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian/ bidang. Tujuan revitalisasi adalah terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan dalam mendukung pertumbuhan wilayah yakni meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan transmigrasi.

Penelitian ini akan mengkaji satu arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yaitu peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan yang salah satu strateginya adalah melalui memanfaatkan modal sosial dan budaya untuk peningkatan pembangunan kawasan transmigrasi. Penelitian ini difokuskan pada memanfaatkan modal sosial.

Konsep modal sosial intinya terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu, kepercayaan, jaringan dan norma. Jaringan yang dalam hal ini adalah kerjasama perlu dikembangkan untuk mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi. Terdapat 3 (tiga) jenis jaringan/kerjasama dalam modal sosial yaitu *bonding*, *bridging*, dan *linking*. *Bonding* apabila kerjasama terjadi pada level yang sama/setara dalam satu wilayah (1 SKP). *Bridging* apabila kerjasama terjadi pada level yang sama antar wilayah (antar SKP). *Linking* apabila kerjasama terjadi pada antar kawasan atau dengan pihak lain yang memberikan keuntungan dalam revitalisasi kawasan transmigrasi (antar kawasan atau dengan pihak luar).

Penelitian ini difokuskan pada kerjasama antar-desa yang terdapat di kawasan transmigrasi. Aspek yang dianalisis meliputi bentuk-bentuk kerja sama yang ada di kawasan transmigrasi, baik pada level *bonding*, *bridging* dan *linking* serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis tersebut disusun strategi pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial untuk mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi.

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



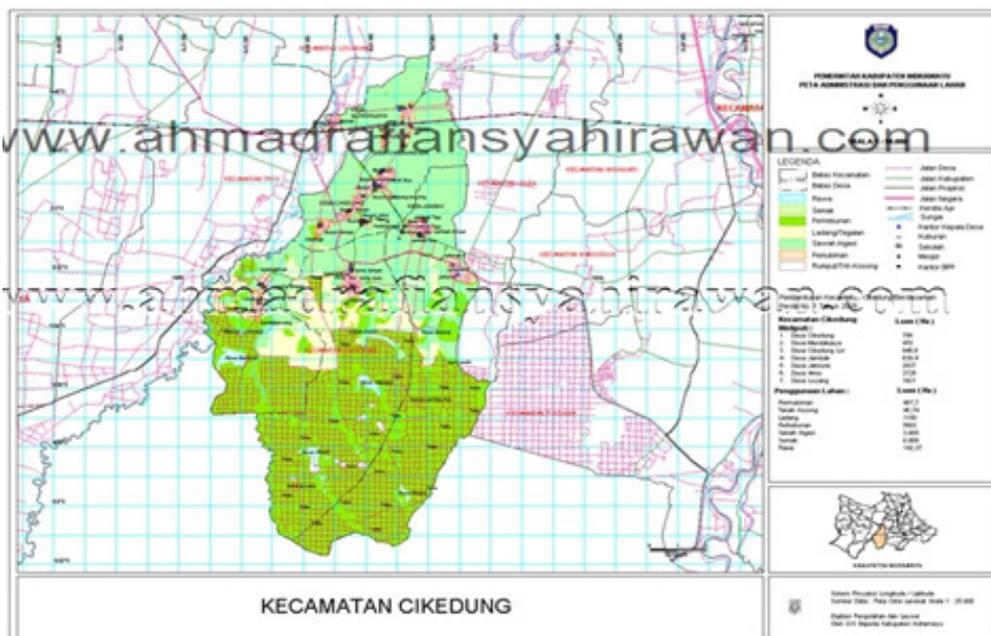
3

PEMBELAJARAN KORPORASI TANI MULUS EMAS, KECAMATAN CIKEDUNG, KABUPATEN INDRAMAYU

3.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIKEDUNG, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT

Kecamatan Cikedung adalah salah satu kecamatan bagian Selatan yang ada di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cikedung dahulunya mencakup wilayah Terisi dan sekitarnya yang sekarang telah menjadi kecamatan tersendiri. Luas wilayahnya 113.782 Km₂, terdiri dari 7 desa yaitu Desa Amis, Cikedung, Cikedung Lor, Jambak, Jatisura, Loyang, Mundak Jaya. Mayoritas warga Kecamatan Cikedung yaitu Bertani, dikarenakan kondisi susunan tanah yang subur, meliputi padi, palawija, hortikultura (mangga), dan rempah-rempah lainnya. Sebagian besar areal sebelah Selatan ditanam tebu milik PG. Jatitujuh.

Gambar 2. Peta Kecamatan Cikedung



Penduduk Kecamatan Cikedung berjumlah 41.490 jiwa terdiri dari Laki-Laki 20.612 jiwa dan Perempuan 20.878 jiwa. Berikut jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Cikedung.

TABEL 2. PENDUDUK MENURUT DESA DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN CIKEDUNG, TAHUN 2019

No. Desa	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1. Loyang	3.436	3.390	6.826
2. Amis	3.351	3.433	6.783
3. Jatisura	2.082	2.047	4.129
4. Jambak	2.358	2.440	4.798
5. Cikedung	3.962	4.035	7.997
6. Cikedung Lor	3.277	3.377	6.654
7. Mundak Jaya	2.146	2.156	4.302
TOTAL	20.612	20.878	41.490

Sumber: Kompilasi Data, Kecamatan Cikedung Dalam Angka 2020

Luas panen Tanaman Padi sekitar 11.786, 3 Ha. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim 65 ton terdiri dari cabe, ketimun, terong, kacang panjang dan semangka. Produksi buah mangga pertahun 9.607,1 Ton. (Kec. Cikedung Dalam Angka, 2020).

3.2. KOPERASI GAPOKTAN TANI MULUS EMAS

Korporasi Gapoktan Tani Mulus di Kabupaten Indramayu terbentuk pada tahun 2014 yang merupakan perkembangan dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang berada di 3 wilayah kecamatan yaitu kecamatan Lelea, Cikedung dan Terisi. Jumlah anggota kelompok gapoktan ini sebanyak 2.175 orang dengan luas lahan 6.674 ha dengan produktivitas per ha mencapai 8-9 ton. Kemudian pada tahun 2021 terbentuklah korporasi petani yaitu PT. Tani Mulus Emas.

Bidang usaha yang dikembangkan koperasi gapoktan tani mulus ada 3 (tiga) yaitu budi daya padi meliputi Pengembangan Padi yang telah mendapatkan penguatan produk PSAT yang menghasilkan beras premium maupun medium memiliki RICE MILLING UNIT (RMU) untuk memproduksi beras dan gabah Pecah Kulit (PK), bidang peternakan unggas dan kambing meliputi dalam skala kecil kelompok tani mengembangkan peternakan unggas (entog & ayam kampung), koperasi meliputi pembentukan kelembagaan Koperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Koperasi ini dalam pembentukannya mendapat pendampingan dari Kementerian Pertanian. Komoditas yang dikembangkan di Kawasan sentra produksi pangan Indramayu mengusahakan padi sebagai komoditas unggulan dominan, mangga dan tebu.

Petani yang bersedia bergabung dengan TME diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang dikoordinir oleh kelompok taninya dengan melampirkan nama anggota dan luas lahan yang dimiliki. Selanjutnya di buat kontrak farming antara petani dengan TME yang berlaku per musim tanam. Dalam kerjasama tersebut petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, TME menyediakan saprodi dan biaya usaha tani.

Kemudian dalam pembagian tugas/peran petani fokus pada budi daya tanaman mulai dari pengolahan lahan sampai panen, sedangkan TME bertugas pengolahan pasca panen, pemasaran, dan menjaga stabilitas harga pasar.

Petani anggota koperasi gapoktan tani mulus mendapatkan pinjaman KUR dari BI sebesar 4,9 miliar melalui TME untuk usaha budidaya tanaman pangan (padi). Pinjaman ini dimanfaatkan secara bergulir dan pembayaran dilakukan pada saat panen padi.

Manfaat koperasi gapoktan tani mulus untuk desa adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi desa serta adanya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh TME seperti teknik memilih benih dan treatment air. Target TME ke depan adalah (1) menampung masukan hasil pertanian desa-desa di wilayah Kecamatan Cikedung, Lelea dan Terisi, (2) menghimpun mitra-mitra pengumpul beras agar mereka menjual berasnya ke TME dan 3) melakukan penjajagan ke jaringan yang lebih luas, 4) Kerjasama dengan Gapoktan untuk merekomendasi mesin penggilingan sesuai standar digitalisasi, sehingga punya produk beras sendiri, 5) Pengadaan silo dengan kapasitas 500 ton - 1000 ton, untuk menjaga stok gabah, 6) Penjualan produk beras dengan berbagai kualitas baik online maupun offline.

3.3. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN KORPORASI PETANI

3.3.1. FAKTOR PENDORONG

Keberhasilan koperasi gapoktan tani mulus kecamatan cikedung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya pendampingan dari pemerintah c.q kementerian Pertanian dan Dinas yang terkait di kabupaten. Pendampingan dilakukan dengan pemberian saprodi pertanian bagi kelompok tani yang menjadi anggota koperasi

2. Adanya stimulus modal dari perbankan dalam hal ini BNI untuk memberikan pinjaman modal usaha bagi petani melalui sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman ini diberikan secara bergilir sehingga seluruh kelompok petani mendapat kesempatan untuk mendapatkan kredit
3. Adanya dukungan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat, yang salah satunya diwujudkan dengan adanya pembangunan saluran irigasi dan infrastruktur jalan usaha tani dengan menggunakan dana desa.

3.3.2. FAKTOR PENGHAMBAT

Dalam membentuk kegiatan yang bersifat kelompok tidak mudah dan seringkali mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan karena:

1. Sulit untuk mengajak kelompok tani bergabung. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang bersifat kelompok (korporasi) menyebabkan masyarakat enggan untuk bergabung dalam koperasi, hal ini disebabkan persepsi masyarakat bahwa bergabung menjadi anggota koperasi belum memberikan manfaat dan hanya akan dimanfaatkan oleh para pengurus dan pengambil kebijakan.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kerjasama, menyebabkan motivasi mereka rendah.
3. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh koperasi gapoktan tani mulus menyebabkan belum semua kelompok tani yang ada dikecamatan cikedung dapat bergabung menjadi anggota
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap peran koperasi gapoktan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.4. PRAKTIK BAIK KORPORASI PETANI

Korporasi petani merupakan kelembagaan baru yang diintroduksi di dalam kawasan. Lembaga ini menyangkut banyak elemen kelembagaan dan organisasi yang telah ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan sejenisnya. Dalam implementasinya korporasi petani merupakan suatu mekanisme kooperatif (*cooperative*) dalam pengelolaan usaha pertanian yang terintegrasi dalam sistem hulu-hilir pada satu kawasan sentra produksi pangan, yang diikuti oleh badan usaha yang anggotanya petani karena Korporasi Petani dibangun dari, oleh dan untuk petani. Dalam pengembangan Korporasi Petani melibatkan berbagai usaha di bagian hulu dan hilir yang saling mendukung dalam satu manajemen koperasi. Kegiatan yang bersifat hulu seperti produksi benih, pupuk, pestisida, penyewaan alat mesin pertanian. Sedangkan kegiatan hilir meliputi, pengolahan hasil, packing dan pemasaran. Adanya keterlibatan usaha/ industri dalam korporasi petani menunjukkan adanya kerjasama yang sinergis, saling menguatkan dan menguntungkan meskipun tidak terikat secara formal dalam bentuk kerjasama.

Dalam mempersiapkan kelembagaan Koperasi Petani, dilakukan identifikasi terhadap 3 (tiga) hal yaitu apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, dan siapa yang akan melakukan. *What* (Apa yang dilakukan), Mengidentifikasi terhadap potensi desa/komoditas yang akan dikembangkan. *How* (Bagaimana melakukan), mengidentifikasi terhadap tahapan aktifitas usaha yang akan dilakukan dalam melaksanakan usahanya, hal ini penting untuk mengetahui jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan siapa yang kompeten untuk melakukan kegiatan tersebut. *Who* (Siapa yang melakukan), mengidentifikasi para pelaku yang sesuai dengan bidangnya. Kegiatan identifikasi ini dilakukan secara musyawarah dan dilakukan berkali-kali sampai mendapat kesepakatan dari berbagai pihak yang akan terlibat dalam Korporasi Petani.

Adanya korporasi petani ini akan memberikan keuntungan pada anggotanya yaitu mengurangi/ada penghematan dalam biaya usahatani dan akan memberikan nilai tambah karena pengelolaannya dari hulu sampai hilir. Kegiatan ini akan bermanfaat dan memberikan nilai tambah/berhasil apabila dilakukan dalam skala kawasan. Sebagai contoh, untuk komoditas padi skala luasan yang ideal untuk pengembangan korporasi petani adalah satu kawasan dengan luas 10.000 ha sawah.

Korporasi Petani di Kabupaten Indramayu didesain melalui lembaga yang bersifat relasi pasar, yaitu keterlibatan para pihak/pelaku ekonomi yang ada di kawasan untuk bekerjasama dengan motivasi keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak. Mekanisme ini ketika sudah berjalan akan bertransformasi menjadi lembaga Korporasi Petani. Sebagai contoh, Korporasi Petani Cikedung, Kecamatan Cikedung (Indramayu) merupakan kerjasama 15 koperasi primer yang menjalankan 6 (enam) jenis bisnis (*off-farm*). Secara bertahap koperasi-koperasi tersebut didorong untuk membentuk koperasi sekunder. Koperasi sekunder inilah yang akan bertransformasi menjadi lembaga Korporasi Petani. Sementara itu, kegiatan *on-farm* dilakukan oleh petani secara individual yang mengusahakan padi, mangga, dan tebu. Para petani tergabung dalam kelompok tani/gapoktan, dan diharapkan menjadi anggota dari koperasi primer yang tergabung dalam Korporasi Petani. Keanggotaan petani dalam poktan/gapoktan adalah untuk kemudahan akses dalam berusaha tani. Konfigurasi Korporasi Petani Cikedung disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3. Konfigurasi Korporasi Petani Cikedung (Kecamatan Cikedung, Indramayu)



Sumber: Syahyuti dkk. (2021). Korporasi Petani Kecamatan Cikedung Kab Indramayu: Potensi Bisnis dan Rancangan Kelembagaan. Materi FGD. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementan.

Keterangan:

- Usaha produksi benih padi dijalankan oleh 1 koperasi (Desa Mundakjaya)
- Usaha jasa permodalan usaha (padi, manga, tebu) dijalankan oleh 7 Koperasi (satu koperasi per desa).
- Pelayanan jasa Alsintan (padi, tebu) dijalankan oleh 2 koperasi padi dan 1 koperasi tebu

- Pengolahan dan penjualan beras premium dijalankan oleh 2 koperasi
- Penjualan gula petani dijalankan oleh Koperasi Langgeng Desa Amis
- Usaha produksi konsentrat sapi dijalankan oleh Koperasi Taruna Tani Desa Loyang

Kerjasama antar pihak telah dilakukan yaitu dengan a) pemerintah daerah : kegiatan TPID (pasar murah komoditi), pendampingan intensif, sarana produksi dan alat mesin pertanian. b) Dukungan pemerintah pusat yaitu bantuan untuk pasca panen berupa teknologi *Rice Milling Unit* sebagai sarana untuk penguatan produk, akses Kerjasama dan pemerintah. c) dengan Bank Indonesia berupa: 1) peningkatan produksi: ekstensifikasi dan intensifikasi lahan kluster, melalui pembuatan demplot, 2) Akses pasar dan permodalan: pemanfaatan platform digital marketing dan payment, 3) Sertifikasi produk halal, PSAT, kemasan produk. 4) Capacity building dan PSBI meliputi pelatihan, studi banding, teknologi, infrastruktur.

Beberapa hal yang mempengaruhi keberlangsungan korporasi petani adalah kelompok tani merupakan komunitas yang penting di dalam korporasi petani, karena kelompok tani dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam berbagai aktifitas usaha tani, sehingga penguatan kelompok tani merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum membentuk korporasi petani.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan korporasi yaitu 1) pengelolaan korporasi termasuk didalamnya *leadership*, 2) pendekatan emosional anggota dan 3) kepastian keuntungan kepada para anggotanya.

4

KERJASAMA DI KAWASAN TRANSMIGRASI

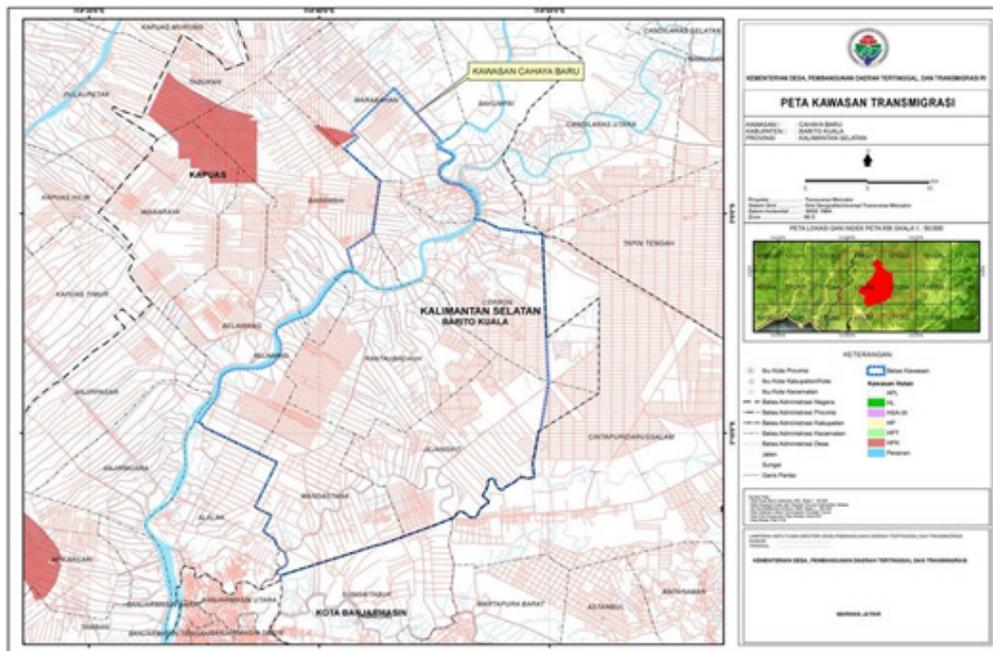
Modal Sosial merupakan faktor yang dibutuhkan dalam pembangunan kawasan transmigrasi, karena adanya modal sosial akan dapat mengungkit modal-modal lainnya seperti modal finansial, modal alam, modal fisik dan modal manusia sehingga dapat saling mendukung dan mempercepat pembangunan. Pada prinsipnya modal sosial terdiri dari 3 aspek yaitu jaringan, kepercayaan dan norma (Lawang, 2005). Dalam kajian ini kerjasama di kawasan transmigrasi akan disoroti dari aspek jaringan.

4.1. GAMBARAN UMUM KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) CAHAYA BARU

4.1.1. LETAK ADMINISTRATIF KTM CAHAYA BARU

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Cahaya Baru secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2008 (yang kemudian berubah menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2010) dengan masterplan yang dibuat pada tahun 2008. Sebelum adanya program KTM, kawasan ini sudah dihuni oleh para transmigran.

Gambar 4. Peta Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru



Deliniasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru melingkupi 7 kecamatan yang terdiri dari Marabahan, Mandastana, Jejangkit, Cerbon, Barambai, Belawang, dan Rantai Badauh. Struktur ruang KTM Cahaya Baru terbagi menjadi 6 SKP, yaitu 1 SKP-P di Kecamatan Marabahan (ibukota Kabupaten Barito Kuala) sebagai pusat pengembangan ekonomi Kawasan Transmigrasi serta pelayanan sosial dan pemerintahan. Lima SKP lainnya mencakup 6 kecamatan, yang diperuntukkan sebagai sentra pertanian dan perkebunan. Pusat KTM Cahaya Baru terletak di Kelurahan Ulu Benteng yang sangat dekat dengan Kelurahan Marabahan Kota (pusat ibukota kabupaten Barito Kuala) yang masih masuk dalam jangkauan KTM (5 km) sehingga fasilitas yang ada cukup lengkap. KTM Cahaya Baru memiliki total luas kawasan 61.157.70 Ha. Secara struktur ruang KTM Cahaya Baru terdiri dari 6 SKP yaitu SKP A meliputi 2 kecamatan yaitu Mandastana dan Jejangkit yang terdiri dari 14 desa, SKP B meliputi kecamatan Mandastana dengan 3 desa, SKP C meliputi 3 kecamatan yaitu Mandastana Belawang dan Rantau Baduah dengan 9 desa yang di dalamnya terdapat desa Karang Bunga dan Samuda sebagai lokus penelitian, SKP Pengembangan meliputi 3 kecamatan yaitu Barambai, Cerbon dan Marabahan dengan 12 desa, SKP D meliputi 3 kecamatan

yaitu Berambai, Randau Batuah, Belawang, dan SKP E meliputi 2 kecamatan yaitu Jejangkit dan Cerbon dengan 18 desa.

4.1.2. POLA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN

Berdasarkan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala terdapat sembilan kawasan yang ditetapkan sebagai pola ruang di KTM Cahaya Baru yaitu, kawasan budidaya perikanan, kawasan industri, perkebunan, permukiman, pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, pertambangan mineral, sempadan mineral dan sungai. Pola pemanfaatan ruang berupa pertanian pangan seluas 31.970 (55,79%) merupakan lahan yang terluas. Pola ruang KTM Cahaya Baru.

TABEL 3. POLA RUANG KTM CAHAYA BARU

No.	Alokasi Ruang	Luas Lahan	
		Ha	%
1.	Kawasan Budidaya Perikanan	383	0,64
2.	Kawasan Industri	270	0,45
3.	Kawasan Perkebunan	12.624	21,26
4.	Kawasan Permukiman	4.490	7,56
5.	Kawasan Pertanian Hortikultura	4.437	7,53
6.	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	32.971	54,00
7.	Pertambangan Mineral	5	0,01
8.	Sempadan Mineral	3.366	5,67
9.	Sungai	1.711	2,88

Sumber: Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala, 2017

Penggunaan lahan di Wilayah KTM Cahaya Baru didistribusikan menjadi beberapa kegunaan, diantaranya adalah sebagai permukiman warga, persawahan, tegalan/pertanian lahan kering, kebun campuran, perkebunan, hutan, danau/rawa dan alang-alang. Penggunaan lahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017, penggunaan lahan di KTM

Cahaya Baru didominasi oleh sawah seluas 30.569 (51,47%). Semak belukar merupakan penggunaan terbesar kedua dengan luas 24.425 ha (41,13%) yang masih memiliki potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Penggunaan lahan di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 4. PENGGUNAAN LAHAN DI WILAYAH KTM CAHAYA BARU

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan	
		Ha	%
1.	Hutan	284	0,48
2.	Kebun	628	1,06
3.	Lahan Terbuka	1.310	2,21
4.	Permukiman	444	0,75
5.	Sawah	30.569	51,47
6.	Semak Belukar	24.425	41,13
7.	Tubuh Air	1.731	2,91

Sumber: Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala, 2017

4.1.3. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas pelayanan umum yang sudah terbangun di kawasan KTM terdapat di kawasan penyangganya berupa fasilitas perkantoran pemerintah, perkantoran BUMN dan perkantoran swasta. Kondisi Fisik sarana dan prasarana yang telah dibangun di Pusat KTM Cahaya Baru, meliputi : Tugu KTM, Jalan Penghubung Menuju Pusat KTM, Gapura Pintu masuk Kawasan KTM Cahaya Baru, Kantor Pengelola KTM Cahaya Baru (Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Taman Kota, Rumah Pintar, *Guest House*, Gedung DPRD, Masjid, Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Dermaga penyeberangan dan ruang tunggu, PLN, PDAM, Sekolah: TK, SD, SMP, SMA Rumah Sakit

4.2. BENTUK KERJASAMA SEBAGAI MODAL SOSIAL DI DESA KARANG BUNGA, KECAMATAN MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA

Dalam menganalisis jaringan/kerjasama yang ada di kawasan transmigrasi menggunakan 3 (tiga) dimensi/pendekatan, yaitu: (1) Grup dan Jaringan yang merupakan kelompok masyarakat, pendekatan ini untuk mengetahui sifat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai jenis organisasi sosial dan jaringan informal, dan jangkauan kontribusi yang diberikan atau diterima dari organisasi/jaringan tersebut, (2) Kepercayaan dan Solidaritas, untuk mengetahui mengenai kepercayaan masyarakat terhadap orang lain, pelayanan publik dan pelayanan informasi dan lain-lain serta tingkat kemauan masyarakat untuk saling menolong dan membantu orang/gotong-royong, (3) Aksi dan Kerjasama Kolektif, untuk mengetahui bagaimana masyarakat bekerja dengan orang lain di komunitas mereka dalam proyek bersama dan/atau dalam merespon suatu krisis (Narayan, 2005).

4.2.1. BENTUK KERJASAMA

4.2.1.1. GRUP DAN JARINGAN/KELOMPOK MASYARAKAT

Dalam pembangunan desa, kelompok masyarakat mempunyai peranan yang penting karena adanya kelompok masyarakat akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Kelompok masyarakat yang ada di Desa Karang Bunga jumlahnya banyak dan beragam dengan aktivitas yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelompok masyarakat formal dan informal. Kelompok masyarakat formal biasanya terbentuk karena prakarsa pimpinan/pengambil kebijakan, sedangkan kelompok masyarakat informal terbentuk karena adanya inisiatif dari tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Secara rinci jumlah dan aktivitas kelompok masyarakat yang ada di Desa Karang Bunga tersaji pada tabel berikut ini.

TABEL 5. JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT DAN AKTIVITASNYA DI DESA KARANG BUNGA BERDASARKAN BIDANG

No.	Nama Kelompok	Jml. Klpk.	Ide Pembentukan Klpk.	Tujuan Pembentukan Klpk.	Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Kendala Pengembangan
1. Bidang Pertanian							
1.a.	Gapoktan	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Meningkatkan hasil pendapatan pertanian masyarakat Desa	Memfasilitasi pengadaan alat pertanian	Aktif	Masing-masing anggota kelompok masih sibuk dengan aktifitas sendiri
1.b.	Kelompok tani	9	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Meningkatkan hasil pendapatan anggota kelompok tani	Mengadakan kegiatan sekolah tani lapang	Aktif	Masing-masing anggota kelompok tani tidak memiliki motivasi yang kuat
1.c.	Kelompok wanita tani	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Pemberdayaan warga perempuan yang ada di desa	Pemanfaatan halaman pekarangan untuk menanam sayur mayur	Aktif	Masing-masing kelompok tani sibuk pada urusan Rumah Tangga masing-masing
1.d.	Petani milenial	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Pemberdayaan petani petani Milenial di Desa Karang Bunga	Sekolah lapang petani muda dan inovasi alat pertanian	Aktif	Masing-masing petani muda sibuk dengan aktifitas masing-masing
2. Bidang Kesenian dan Wisata							
2.a.	Campur-sari	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Pelestarian budaya music campursari	Latihan rutin mingguan kelompok music campursari	Aktif	Masing-masing anggota ada kesibukan
2.b.	Jaranan butho	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Pelestarian budaya jaranan butho masyarakat eks-transmigrasi dari Banyuwangi	Latihan mingguan dan pentas di acara hajatan warga dan hari besar Desa	Aktif	Masing-masing anggota punya kesibukan sendiri-sendiri

No.	Nama Kelompok	Jml. Klpk.	Ide Pembentukan Klpk.	Tujuan Pembentukan Klpk.	Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Kendala Pengembangan
2.c.	Reog Ponorogo	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Pelestarian budaya jaranan Reog Ponorogo masyarakat eks-transmigrasi dari Ponorogo	Latihan mingguan dan pentas acara hajatan warga dan hari besar Desa	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing
2.d.	Jaranan kuda kepong	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Pelestarian budaya jaranan kuda kepong	Latihan mingguan dan pentas acara hajatan	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing
2.e.	Pokdarwis	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Pengembangan Kawasan dan pengelolaan Desa wisata	Pengembangan rumah jeruk dan desa agroeduwisata	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing
3. Bidang Olah Raga							
3.a.	Sepak bola putra	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai sarana wadah pengembangan potensi pemuda di olah raga sepak bola	Mengikuti pertandingan dan lomba juga ada Latihan mingguan	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing
3.b.	Bola Volly	2	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai sarana wadah pengembangan potensi pemuda di olah raga bola voly	Mengikuti pertandingan dan lomba juga ada Latihan mingguan	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing
4. Bidang Agama							
4.a.	Maulid habsy	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai bentuk peningkatan syiar islam di masyarakat	Agenda rutin mingguan dan tampil pada hari besar keagamaan	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing

No.	Nama Kelompok	Jml. Klpk.	Ide Pembentukan Klpk.	Tujuan Pembentukan Klpk.	Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Kendala Pengembangan
4.b.	Yasinan	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai bentuk upaya peningkatan Kerjasama keagamaan di masyarakat	Agenda rutin mingguan	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing
4.c.	Arisan	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai bentuk upaya kerukunan antar masyarakat khususnya ibu-ibu	Agenda Rutin Mingguan	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan aktifitas masing-masing
5. Bidang Umum							
5.a.	Bumdesa	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai organisasi pemegang ujung tombak perekonomian Desa	Peningkatan unit usaha bumdes, bumdesa expo dll	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan anggota masing-masing
5.b.	Karang Taruna	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai wadah peningkatan pemuda	Perayaan HUT RI, mengikuti lomba dan hari jadi Desa	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan anggota masing-masing
5.c.	PKK	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai wadah peningkatan kelompok perempuan	TP3PKK, LP3PKK, Workshop PKK	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan anggota masing-masing
5.d.	Dasa Wisma	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai wadah peningkatan kelompok ibu-ibu Di Desa	Bimtek dasa wisma dan pelatihan kader dasa wisma	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan anggota masing-masing

No.	Nama Kelompok	Jml. Klpk.	Ide Pembentukan Klpk.	Tujuan Pembentukan Klpk.	Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Kendala Pengembangan
5.e.	Forum anak remaja	1	Tokoh masyarakat dan masyarakat	Sebagai agenda peningkatan silaturahmi antar remaja setingkat SD, SMP dan SMA di Desa Karang Bunga	Mengadakan kemah Bakti remaja forum anak	Aktif	Masing-masing anggota kelompok sibuk dengan anggota masing-masing

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil diskusi dengan informan diketahui bahwa kelompok masyarakat yang ada di Desa Karang Bunga terbentuk karena inisiatif tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Namun demikian pembentukan kelompok juga dilaksanakan melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di desa seperti tokoh masyarakat, aparat desa, kelompok tani, karang taruna, kelompok wanita, kelompok pemuda dll. Hal ini menggambarkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kelompok sehingga diharapkan kelompok yang terbentuk akan kuat dan berkelanjutan karena ada dukungan dari masyarakat.

Tujuan pembentukan kelompok berbeda-beda tergantung pada jenis kelompoknya, yaitu:

1. Kelompok di bidang pertanian karena basisnya adalah usaha pertanian, dengan tujuan pembentukan kelompok untuk meningkatkan pendapatan kelompoknya dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan pemberdayaan/peningkatan kapasitas terutama untuk kaum perempuan dan kaum milenial yang terkait dengan usaha pertanian seperti sekolah lapang dan inovasi teknologi
2. Kelompok kesenian dan wisata, pembentukan kelompok ini bertujuan untuk melestarikan budaya kesenian yang berasal dari daerah asal transmigran seperti jaranan butho dari Banyuwangi, reog po-

norogo dari Ponorogo dan budaya modern seperti campursari. Kegiatan kesenian ini biasanya akan pentas pada acara hajatan warga seperti pernikahan, sunatan, dan syukuran serta peringatan dan hari jadi Desa. Sedangkan kelompok Pokdarwis dibentuk karena adanya rencana pengembangan kawasan agroeduwisata di Desa Karang Bunga. Saat ini aktivitas pokdarwis adalah pengembangan rumah jeruk dan persiapan untuk agroeduwisata dengan melakukan identifikasi potensi desa.

3. Kelompok bidang olah raga, tujuannya sebagai sarana wadah pengembangan potensi pemuda dan olahraga dan melakukan aktivitas mengikuti lomba-lomba yang ada di desa.
4. Kelompok bidang agama, tujuannya untuk syiar agama islam dan meningkatkan kerukunan antar warga/masyarakat. Kelompok ini dapat juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan tentang informasi-informasi yang ada di desa.
5. Kelompok Umum, kelompok ini terdiri dari Bumdes, karang taruna, PKK, dasa wisma dan forum anak remaja. Bumdes dibentuk untuk memfasilitasi kelompok tani dalam meningkatkan usaha dan pendapatannya sehingga menjadi ujung tombak peningkatan perekonomian desa. Sedangkan pembentukan karang taruna, PKK, dasa wisma dan forum anak remaja tujuannya untuk meningkatkan peran pemuda, kelompok perempuan dan ibu-ibu di desa dalam pembangunan desa khususnya untuk program-program yang bersifat sosial.

Partisipasi anggota kelompok masyarakat sangat aktif, hal ini diindikasikan dengan banyaknya anggota yang hadir dalam pertemuan dan memberikan masukan. Di samping itu apabila dalam salah satu kelompok ada kegiatan, kelompok yang lain turut membantu. Mereka bekerja dengan sukarela dan didasari rasa kebersamaan untuk membangun desanya.

4.2.1.2. KEPERCAYAAN DAN SOLIDARITAS

Faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan kerjasama salah satunya adalah adanya kepercayaan antar pihak yang melakukan kerjasama. Namun demikian membangun kepercayaan terhadap seseorang bukanlah hal yang mudah, sehingga perlu pendekatan-pendekatan untuk meyakinkan masyarakat. Di Desa Karang Bunga kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh ketokohan dan persamaan etnis. Masyarakat akan percaya pada tokoh yang memberi keteladan pada kegiatan yang ada di desa. Figur-figur keteladan yang baik tersebut akan dapat menimbulkan rasa kepercayaan bagi masyarakat, lembaga, maupun instansi lintas sector baik swasta maupun pemerintahan. Sedangkan faktor kesamaan etnis lebih disebabkan karena mereka berasal dari suku/asal daerah yang sama sehingga masyarakat sudah memahami karakternya atau mempunyai karakter yang hampir sama. Beberapa hal yang dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat yaitu : (1) memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, (2) memberikan penjelasan yang mudah dipahami terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan (3) meyakinkan kepada masyarakat dengan memberikan contoh yang baik dan benar, (4) memberikan keteladan dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan, dan (5) mempraktekan langsung di lapangan. Di samping hal-hal tersebut beberapa faktor yang berpengaruh terhadap rasa percaya adalah adanya: (1) niat, program dan tujuan yang sama, (2) komitmen, kejujuran dan loyalitas untuk sama-sama membangun desa, (3) disiplin, tanggungjawab dan semangat bekerja sama satu sama lain. Adanya kepercayaan ini menjadi dasar bagi kelompok masyarakat untuk dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Desa Karang Bunga merupakan eks permukiman transmigrasi sehingga komunitas masyarakat desanya mempunyai karakter yang beragam dan berbeda-beda karena mereka berasal dari berbagai daerah asal yang berbeda-beda seperti Ponorogo, Sragen, Banyuwangi, Madiun dan Lombok. Meskipun mempunyai karakter yang berbeda namun solidaritas masyarakat desa tinggi, hal ini ditunjukkan mereka dapat

bekerjasama dengan baik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa seperti memperingati hari jadi desa, pada saat peringatan tersebut semua masyarakat saling bantu membantu membuat hiasan-hiasan pada gang masing-masing, dan pelestarian budaya jawa dalam kegiatan do'a bersama sebelum tanam padi di sawah, dalam kegiatan ini masyarakat lokal (Suku Banjar) ikut berpartisipasi hadir dan menyediakan konsumsi yang berupa tumpeng dari rumah masing-masing. Kegiatan lainnya yaitu apabila ada yang meninggal dunia atau mempunyai hajatan, masyarakat saling bantu membantu baik dalam bentuk moril/tenaga materil, gotong-royong menggarap lahan pada waktu musim padi, gotong-royong membangun/memperbaiki rumah. Bentuk solidaritas juga ditunjukkan pada saat pandemi kemarin masyarakat saling bantu membantu untuk memenuhi kebutuhan bagi warganya yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri. Dalam melakukan kegiatan tersebut mereka secara sukarela dan atas inisiatif sendiri dan tidak membedakan asal mereka yang merupakan warga pendatang maupun lokal. Timbulnya rasa solidaritas/saling tolong menolong dan bergotong-royong tersebut karena mereka percaya bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan secara berkelompok akan lebih mudah, cepat selesai dan bermanfaat karena didasari kebutuhan yang sama.

4.2.1.3. AKSI DAN KERJASAMA KOLEKTIF

Kegiatan desa selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang ada di desa. Mereka bekerjasama sesuai dengan peran masing-masing. Beberapa contoh bentuk kegiatan yang dilakukan bersama adalah: (1) pada acara memperingati hari jadi desa, dalam kegiatan ini kelompok masyarakat yang terlibat adalah PKK dengan peran menyediakan konsumsi untuk para tamu undangan, kelompok Karang Taruna sebagai panitia yang mengatur pelaksanaan kegiatan, dan Bumdes berperan dalam penjualan/promosi produk-produk desa, (2) program PKTD perbaikan saluran irigasi pada 20 RT yang kegiatannya dianggarkan pada penggunaan Dana Desa, Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tenaga kerja yang terlibat adalah seluruh masyarakat Desa Karang Bunga tidak terkecuali orang yang sudah

tua. Namun demikian karena kebersamaan dan atas kesepakatan bersama biaya upah kerja tersebut tidak diterima kepada pekerja melainkan digunakan untuk memelihara lingkungan seperti perbaikan/pengerasan jalan desa yang rusak atau disimpan menjadi kas RT dan akan digunakan untuk keperluan/biaya operasional RT, (3) pembuatan jalan usaha tani anggaran untuk upah tenaga kerja dialokasikan pada APBDes, namun demikian upah tersebut tidak dibayarkan kepada masyarakat yang bergotong-royong membangun jalan tersebut melainkan untuk pembelian material sehingga jalan yang dibangun lebih kuat dan tambah volume panjang jalan yang dibangun, (4) desa mempunyai program pembangunan PAUD dan perbaikan lapangan volley, kegiatan ini dilakukan oleh kelompok karang taruna dan upah tenaga yang dianggarkan disimpan untuk menjadi uang kas kelompok. Hal ini terjadi karena jiwa dan semangat gotong-royong masyarakat desa yang cukup tinggi, semangat untuk membangun desa, motivasi untuk pengabdian desa dan semangat untuk menjadi warga yang berperan dalam pembangunan desa.

4.2.2. AKTIVITAS KERJASAMA

Kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok sangat berbeda-beda dan sangat tergantung dari tujuan pembentukan kelompok. Sebagai contoh Gapoktan yang merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani yang ada di Desa Karang Bunga yang basis usahanya adalah pertanian untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa maka aktifitas gapoktan memfasilitasi untuk pengadaan alat-alat pertanian. Sedangkan kelompok karang taruna lebih kepada kegiatan yang bersifat kepemudaan seperti pembentukan kelompok olah raga dan lain-lain. Dalam melakukan aktivitasnya terdapat beberapa kelompok yang sudah menjalin kerjasama dengan beberapa elemen seperti dengan kelompok lainnya, perguruan tinggi, perbankan dan dinas terkait yang berada di Kabupaten Batola. Secara rinci aktivitas kerjasama di desa Karang Bunga tersaji pada tabel berikut.

TABEL 6. AKTIVITAS KERJASAMA DI DESA KARANG BUNGA

No.	Nama Kelompok	Mitra Kerjasama	Kegiatan yang Dikerjasamakan
1.	Kelompok tani	Kelompok tani lainnya dalam 1 desa	Sekolah lapangan: Pelatihan budidaya tanaman jeruk dan padi
2.	Karang Taruna	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengelola Tempat parkir pasar desa
3.	Gapoktan	Dinas Pertanian	Fasilitasi alat-alat pertanian
4.	Bumdes Berkah bersama	Bank BRI	Peminjaman modal usaha melalui KUR
	Rumah Jeruk Karang Bunga	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI)	Pelatihan Manajemen/pengelolaan Bumdes
		Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin	Pelatihan peningkatan kualitas produk jeruk dan turunannya
	BPSPAM maju bersama	Dinas Kesehatan Kabupaten Batola	Peningkatan kualitas air bersih berskala desa

Sumber: data primer diolah, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 6 kelompok masyarakat yang telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pertanian dan Kesehatan Kabupaten Batola, BRI, STIMI dan UNISKA, dan kelompok tani lainnya yang ada di desa tersebut. Kegiatan yang dikerjasamakan bervariasi mulai dari budi daya tanaman jeruk dan padi, penguatan modal, sekolah lapangan dan berbagai macam pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat sesuai dengan bidang yang diusahakan.

Bentuk kerjasama yang ada terjadi di desa Karang Bunga adalah sebagai berikut.

Kerjasama inter desa, (1) kerjasama antara kelompok tani satu dengan kelompok tani lainnya dalam kegiatan sekolah lapangan. Kegiatan sekolah lapangan adalah melakukan bimtek kepada kelompok tani tentang budidaya tanaman padi dan jeruk. Dalam kegiatan tersebut masing-masing kelompok tani sharing anggaran untuk biaya

konsumsi, honor narasumber dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kegiatan kerjasama lainnya adalah dalam pengolahan lahan dan panen padi mereka melakukan secara gotong-royong bergantian antar kelompok tani, (2) Kelompok karang taruna melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa dalam mengelola areal parkir di pasar desa. Tujuan kerjasama ini untuk mengatasi permasalahan umum dalam kehidupan bersama mereka dan untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatnya kesejahteraan kelompok yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi desa.

1. Kerjasama antar desa, belum terjadi, namun demikian Desa Karang Bunga telah merencanakan akan melaksanakan kerjasama dengan Desa Karang Indah, Karang Buah, Karang Dukuh dan Desa Samuda dalam mengembangkan konsep Agroeduwisata. Kerjasama antar desa ini di dasari pada wilayah desa-desa tersebut saling berdekatan, mempunyai budaya yang sama dan mempunyai potensi untuk pengembangan agroeduwisata. Kegiatan yang dilakukan masih dalam tahap persiapan yaitu masing-masing desa melakukan identifikasi terhadap potensi yang bisa dikerjakamkan. Di samping itu Desa Karang Bunga dan Desa Samuda akan melakukan kerjasama dalam membuat produk rangkaian bunga melati seperti selendang dan rangkain bunga dalam pot untuk acara pernikahan. Dalam kerjasama ini desa Karang Bunga akan mensuplai bunga melati dan desa Samuda yang memproduksi rangkain bunga melati.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga, Desa Karang Bunga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala, SMITI dan UNISKA dan bank BRI. Bentuk kerjasama yang ada sebagai berikut.
 - Gapoktan bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk fasilitasi alat-alat pertanian, adanya alat pertanian ini akan menunjang keberhasilan budidaya usaha tani tanaman padi dan jeruk.
 - BPSPAM maju bersama sebagai unit usaha Bumdes Berkah Bersama bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam peningkatan kualitas air bersih desa

- Rumah jeruk karang bunga sebagai unit usaha Bumdes Berkah Bersama bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Indonesia (STIMI) dalam pelatihan manajemen pengelolaan Bumdesa dan dengan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) untuk Pelatihan peningkatan kualitas produk jeruk dan turunannya seperti es cream jeruk, lulur kulit jeruk, sirup dan lain-lain bekerjasama dengan perguruan tinggi, perbankan dan dinas kesehatan. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini lebih difokuskan untuk peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang usahanya, dan sudah berjalan sejak tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2022.
- Bumdes Berkah Bersama melakukan kerjasama dengan BRI dalam penguatan modal untuk usaha pertanian dan usaha kecil masyarakat dengan sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di samping itu saat ini desa dengan BRI sedang merintis program “Desa Brilian”. Program ini muncul karena adanya warga/masyarakat pelaku usaha di desa Karang Bunga menjadi agen BRI link yang merupakan program bank BRI. Selanjutnya BRI menjadikan warga tersebut sebagai kandidat pelaku usaha terbaik versi BRI dan menjadi duta BRI dari desa Karang Bunga dalam bazar-bazar dan ekspo yang dilakukan di Jakarta. Program BRI lainnya adalah pengembangan pelayanan melalui digitalisasi baik pada sector keuangan maupun pemerintahan yang akan dilakukan secara sinergitas dengan desa.

4.3. DESA SAMUDA, KECAMATAN BELAWANG, KABUPATEN BARITO KUALA

4.3.1. BENTUK KERJASAMA

4.3.1.1. GROUP DAN JARINGAN/KELOMPOK MASYARAKAT

Masyarakat di desa Samuda telah membentuk beberapa kelompok masyarakat baik yang formal maupun informal. Pembentukan kelompok masyarakat tersebut dibedakan berdasarkan bidang yang digelutinya seperti bidang pertanian 3 (tiga) kelompok, olahraga 1 (satu) kelompok,

agama 2 (dua) kelompok, dan bidang umum 4 (empat) kelompok. Secara rinci kelompok masyarakat yang ada di desa Samuda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 7. KELOMPOK MASYARAKAT YANG ADA DI DESA SAMUDA

No.	Nama Kelompok	Jml. Klpk.	Ide Pembentukan Klpk.	Tujuan Pembentukan Klpk.	Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Kendala Pengembangan
1. Bidang Pertanian							
1.a.	Gapoktan	1	Ketua Kelompok tan dan para petani	Menga-komodasi kepentingan petani dari masing-masing kelompok tani	Penyaluran pupuk kepada petani melalui kelompok tani	Aktif	Kurangnya sumber daya manusia
1.b.	Kelompok tani	6	Petani	Memperkuat kerjasama petani dalam kelompok tani	Menyalurkan bantuan pupuk kepada petani	Aktif	Kurangnya sumber Daya manusia
1.c.	Kelompok wanita tani	1	Ketua Gapoktan, Para Petani wanita	Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya	Sosialisasi tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas kepada petani	Aktif	Kurang SDM dan pemahaman tentang pertanian
2. Bidang Olah Raga							
2.a.	Sepak bola putra	1	Karang Taruna	Menyalurkan bakat para pemuda yang ada di desa	Mengikuti pertandingan lomba antar desa	Kurang Aktif	Tidak tersedianya fasilitas lapangan sepak bola
3. Bidang Agama							

No.	Nama Kelompok	Jml. Klpk.	Ide Pembentukan Klpk.	Tujuan Pembentukan Klpk.	Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Kendala Pengembangan
3.a.	Maulid habsy	1	Masyarakat	Melestarikan dan meneladani kepribadian Rasulullah	Mengikuti lomba maulid habsy antar kecamatan	Aktif	Kurang minat para pemuda dan pemuda di dalam mengembangkan maulid habsy
3.b.	Yasinan	2	Masyarakat	Mempererat tali silaturahmi antar masyarakat	Melaksanakan kegiatan tahlilan	Aktif	Tidak tersedianya fasilitas dalam menunjang kegiatan Yasinan
4. Bidang Umum							
4.a.	Bumdesa	1	Kades, perangkat desa dan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian desa dalam bentuk usaha yang ada di desa	Jasa Penyewaan tenda	Aktif	Tidak adanya alat angkut dalam membawa tenda
4.b.	Karang Taruna	1	Para pemuda yang ada di desa	Sebagai wadah pengembangan generasi muda	Melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan tempat ibadah yang ada di desa	Kurang aktif	Kurangnya minat dan pemahaman tentang organisasi karang taruna
4.c.	PKK	1	Kepala desa dan PKK kecamatan	Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga	Dalam bentuk social membagikan sembako	Aktif	Minimnya dana yang dimiliki oleh PKK
4.d.	Forum anak remaja	1	Kades, Karang Taruna	Wadah partisipasi anak	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap bahaya narkoba kepada remaja di desa	Aktif	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang forum anak remaja

Sumber: data primer diolah, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pembentukan kelompok masyarakat sudah melibatkan berbagai unsur baik dari aparat desa, kelompok tani, masyarakat, pemuda dan perempuan, Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan kelompok masyarakat dilakukan secara partisipatif sehingga diharapkan kelompok yang ada akan bertahan karena semua lapisan masyarakat merasa memiliki. Partisipasi merupakan salah satu hal yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan modal sosial dalam hal ini adalah jaringan dan rasa saling percaya. Apabila dalam masyarakat sudah timbul rasa saling percaya dalam melakukan kegiatan di desa terutama untuk kegiatan-kegiatan yang tujuannya pengembangan ekonomi desa, maka secara tidak langsung pembangunan desa akan berhasil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Sementara jika dilihat dari aspek sosial dan budaya di Desa Samuda telah terbentuk kelompok yasinan/arisan dan maulid habsy yang tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, ini menggambarkan bahwa kerukunan antar umat/masyarakat di desa samuda sudah muncul dan hal ini merupakan modal yang penting dalam kehidupan masyarakat desa. Adanya kerukunan masyarakat desa ini akan mengurangi timbulnya konflik di masyarakat desa, dengan demikian salah satu faktor penghambat pengembangan modal sosial yaitu adanya konflik sudah dapat diatasi.

Adapun tujuan dan aktivitas masing-masing kelompok yang ada di desa Samuda hampir sama dengan desa Karang Bunga yaitu:

1. Kelompok bidang Pertanian bertujuan untuk memfasilitasi para petani dalam budidaya pertanian dan memperkuat kerjasama antar petani sehingga kelompok tani terpenuhi kebutuhannya terutama dalam penyediaan pupuk. Hal ini diharapkan meningkatkan produksi usaha tani.
2. Kelompok olah raga dibentuk untuk menyalurkan bakat para pemuda yang mempunyai keahlian di bidang sepak bola. Kelompok ini mengikuti lomba antar-desa dalam rangka peringatan hari jadi desa dan moment tertentu.

3. Kelompok bidang agama dibentuk untuk melestarikan budaya dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa yang dilakukan melalui kegiatan tahlilan atau yasinan setiap minggu sekali.
4. Kelompok bidang umum, seperti Bumdes bertujuan meningkatkan perekonomian desa dalam bentuk usaha yang ada di desa dengan jasa penyewaan tenda. Sedangkan karang taruna, PKK dan forum anak sebagai wadah pengembangan generasi muda dan anak-anak serta ibu-ibu agar dapat berperan dalam pembangunan desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembersihan lingkungan tempat ibadah yang ada di desa, pembagian sembako, dan sosialisasi terhadap bahaya narkoba kepada remaja di desa.

4.3.1.2. KEPERCAYAAN DAN SOLIDARITAS

Dalam membangun suatu kerjasama, kepercayaan adalah hal yang penting bagi masyarakat desa Samuda, karena kepercayaan merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah kerjasama dapat dilakukan atau tidak. Di samping itu kepercayaan juga merupakan hal yang menjamin keberlanjutan suatu kerjasama. Di desa Samuda kepercayaan masyarakat untuk bekerja secara kelompok masih rendah, hal ini diduga karena terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kerjasama akibatnya masyarakat fokus pada kegiatan masing-masing. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa melakukan berbagai cara untuk membangun kepercayaan melalui ketokohan yaitu melibatkan tokoh masyarakat yang mempunyai keteladanan yang baik dan berpartisipasi secara aktif, dapat meyakinkan dan memberikan contoh yang baik. Di samping ketokohan peran etnis juga berpengaruh terhadap membangun kepercayaan, masyarakat yang memiliki etnis/daerah asal yang sama akan lebih mudah percaya dibandingkan dengan berbeda etnis/daerah asal hal ini karena masyarakat yang mempunyai etnis sama akan mempunyai karakter yang sama pula. Beberapa faktor yang berpengaruh pada timbulnya rasa percaya yaitu: (1) kejujuran, komitmen dan semangat bekerja sama satu sama lain, (2) disiplin, loyalitas, dan saling percaya, (3) tanggungjawab dan mempunyai tujuan yang sama.

Dalam konteks solidaritas, masyarakat Desa Samuda sangat menjunjung tinggi dan melestarikan budaya lokal (banjar) seperti mandi-mandi 7 (tujuh) bulanan, kegiatan ini dilaksanakan pada masyarakat yang hamil 7 (tujuh) bulan, mandi manten diperuntukan para gadis yang akan melaksanakan pernikahan. Acara ini dihadiri masyarakat pendatang dan masyarakat lokal serta para tokoh yang dituakan untuk melakukan siraman air kepada yang bersangkutan. Selanjutnya kegiatan syukuran panen padi yang dilakukan pada waktu masyarakat selesai panen padi, mereka melakukan syukuran di rumah masing-masing secara bergantian. Dalam kegiatan ini masyarakat datang untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah dan masyarakat yang hadir membawa bahan makan untuk membantu kebutuhan yang mempunyai hajat. Solidaritas juga ditunjukkan pada saat perayaan hari besar keagamaan antara lain pada peringatan maulid nabi dan pada hari-hari besar lainnya. Masyarakat Desa Samuda, juga gemar melakukan kegiatan gotong-royong membantu warga yang sedang mengalami musibah dan hajatan lainnya, mereka saling bahu membahu baik dalam bentuk materiil maupun moril. Keterlibatan masyarakat dalam gotong-royong cukup banyak, mereka melaksanakan aktivitas ini secara sukarela dan atas inisiatif dan dorongan semangat kebersamaan untuk membantu sesama.

4.3.1.3. AKSI DAN KERJASAMA KOLEKTIF

Kegiatan aksi dan kerjasama kolektif dilakukan masyarakat desa Samuda untuk kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersifat fisik seperti pembersihan saluran irigasi, perbaikan jalan desa dan lain-lain. Kegiatan tersebut merupakan program desa yang didanai dari anggaran APBDes/penggunaan Dana Desa, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan secara gotong-royong dengan melibatkan seluruh masyarakat desa Samuda. Berdasarkan kesepakatan masyarakat bahwa biaya upah yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut tidak dibayarkan kepada tenaga kerja tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yaitu pembersihan lingkungan Desa Samuda.

4.3.2. AKTIVITAS KERJASAMA

Dalam melakukan aktivitas kegiatan untuk pembangunan desa, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik itu antar kelompok di dalam desa maupun dengan kelompok lain di luar desa. Tabel di bawah ini menggambarkan aktivitas kerjasama kelompok masyarakat di desa Samuda.

TABEL 8. AKTIVITAS KERJASAMA DI DESA SAMUDA

No.	Nama Kelompok	Mitra Kerjasama	Kegiatan yang Dikerjasamakan
1.	Kelompok tani	Kelompok tani lainnya dalam 1 (satu) desa	Budidaya tanaman jeruk dan pengolahan hasilnya (pengolahan lahan, penyetekan bibit dan panen jeruk)
2.	Gapoktan	Gapoktan yang ada di lain desa	Pengelolaan gudang padi
3.	Kelompok Usaha Wanita	UNLAM Banjarmasin	Pendidikan anak-anak SD Pembibitan jahe merah
		Dinas Perdagangan Kabupaten Batola	Pelatihan pembuatan kue-kue kering
4.	Kelompok usaha kue bakery	Kelompok usaha lainnya dalam 1 (satu) desa	Masing-masing kelompok membantu dalam pemasaran kue
5.	Kelompok Usaha merangkai bunga melati	Kelompok usaha lainnya dalam 1 (satu) desa	Pengembangan usaha merangkai bunga melati

Sumber: data primer diolah, 2021

Memperhatikan tabel di atas, terlihat bahwa kelompok masyarakat yang telah melakukan kerjasama masih terbatas pada kelompok-kelompok yang berbasis pengembangan ekonomi seperti gapoktan, kelompok tani dan kelompok usaha wanita. Sementara untuk kelompok lainnya belum melakukan kerjasama. Hal ini diduga karena kegiatan yang berbasis ekonomi lebih menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dibanding kelompok lainnya. Padahal dalam pembangunan desa kelompok sosial dan budaya masyarakat desa juga merupakan faktor penentu keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan desa tersebut. Namun pada kenyataannya hal ini masih belum mendapat

perhatian dari pemerintah desa. Kegiatan yang dikerjasamakan antara lain budidaya tanaman jeruk dan pengolahan hasilnya, pengembangan usaha wanita seperti merangkai bunga melati dan membuat kue bakery serta pembuatan dan pengelolaan gudang padi. Bentuk kerjasama yang terdapat di Desa Samuda adalah sebagai berikut.

Kerjasama internal. Bentuk kerjasama internal desa Samuda adalah adanya kerja sama antara (1) kelompok tani dengan kelompok tani lainnya. Kerjasama yang dilakukan dalam budi daya adalah pengolahan lahan, penyetekan bibit jeruk dan panen jeruk, dalam kegiatan tersebut para kelompok tani saling bergotong-royong secara bergantian. Sedangkan untuk pengolahan hasil jeruk menjadi turunannya, kerjasamanya adalah ada kelompok yang berfungsi sebagai pengumpul hasil panen dan kelompok yang melakukan pengolah hasil menjadi sirup. (2) Kelompok usaha wanita yang terdiri dari 2 (dua) jenis usaha yaitu pembuatan kue *bakery* dan merangkai bunga melati. Untuk pembuatan kue *bakery* masing-masing kelompok saling membantu untuk memasarkan kue produksi kelompok lainnya. Sedangkan merangkai bunga melati adanya kelompok yang bertugas mengumpulkan bunga dan kelompok lainnya merangkai bunga melati menjadi hiasan, selendang dan lain-lain.

Kerjasama Antar desa, Kerjasama antar desa yang ada adalah kerjasama antara gapoktan Desa Samuda dengan gapoktan 2 (dua) desa lainnya yaitu Desa Murung Keramat dan Desa Karang Dukuh di wilayah Kecamatan Belawang dalam pembuatan dan pengelolaan gudang padi. Gudang padi di bangun di desa karang dukuh Kabupaten Belawang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala. Tujuan pembuatan gudang adalah penyimpanan bibit padi unggul. Masyarakat yang menyimpan bibit unggul di gudang tersebut dikenakan biaya sebesar Rp 3.000,- per karung. Uang hasil pembayaran ini dikelola oleh pengurus yang dibentuk dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing gapoktan dan digunakan untuk biaya operasional gapoktan dan honor pengelola gudang padi. Di samping itu, seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa, desa Samuda berencana akan melakukan kerjasama dengan

Desa Karang Bunga dan desa lainnya untuk mengembangkan konsep Agroeduwisata dengan memanfaatkan potensi masing-masing desa.

Kerjasama dengan pihak ketiga, Desa Samuda juga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang dimulai sejak tahun 2020 sampai sekarang. Program UNLAM di desa Samuda adalah pelaksanaan salah satu tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan melakukan bimbingan kepada masyarakat terutama pendidikan anak-anak SD dan membuat demplot budidaya jahe merah. Di samping itu, Desa Samuda juga bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Batola dalam pelatihan kepada kelompok usaha wanita dalam pembuatan kue-kue kering.

Kerjasama yang terjadi di kawasan transmigrasi, baik kerjasama di dalam desa dan antar desa dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya satu sama lain/antar kelompok. Rasa percaya ini timbul karena adanya kebutuhan bersama untuk meningkatkan usaha baik dalam budidaya tanaman pertanian maupun dalam usaha kecil masyarakat desa. Disamping itu adanya kerjasama baik inter dan antar desa akan memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masing-masing desa dapat memanfaatkan pengelolaan potensi unggulan desanya, (b) masing-masing pihak lebih merasakan keadilan, adanya kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan karena dalam kerjasama ada norma atau aturan yang mengikat dan mengatur kerjasama tersebut, (c) memperkecil atau mencegah terjadinya konflik, adanya kerjasama sifat toleransi akan terbentuk sehingga para pihak saling menghormati perbedaan pendapat dan saling menerima sesuai kesepakatan, dan (d) kerjasama dapat menghilangkan ego masing-masing desa, kerjasama dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang sama, artinya dalam kerjasama tujuan yang akan dicapai merupakan kebutuhan bersama sehingga tujuan, niat dan program kerjasama merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan makalah Djoko Puguh Wibowo, 2017 yang menyebutkan kerjasama merupakan salah satu alternatif atau pilihan

untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya desa menjadi efisien dan efektif. Melalui kerjasama juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan maupun mencegah terjadinya konflik kepentingan antar desa.

Untuk mendukung/menguatkan kerjasama yang telah/akan dilakukan Pemerintah Desa Karang Bunga dan Samuda telah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) yaitu perdes tentang menanam bunga dan jeruk, tanah, kewenangan desa dan konsep perdes tentang kerjasama antar desa. Perdes ini yang akan menjadi norma atau aturan dalam melaksanakan kerja sama.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, kerjasama yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan pihak ketiga (perbankan, perguruan tinggi maupun dinas terkait) sebenarnya merupakan sinergitas program antara kedua belah pihak, di mana program-program yang diimplementasikan di desa baik Karang Bunga maupun Samuda merupakan program yang sudah direncanakan oleh masing-masing lembaga (perguruan tinggi, perbankan dan dinas) sebagai contoh untuk BRI dengan program BRI link, Dinas Pertanian dengan pengadaan alat-alat pertanian, dinas kesehatan peningkatan kualitas air bersih desa, dinas perdagangan dengan pelatihan pembuatan kue kering, dan perguruan tinggi dengan program pengabdian masyarakat. Namun demikian karena program-program tersebut selaras dengan program dan kebutuhan desa serta menguntungkan kedua belah pihak maka kegiatan dapat diterima oleh masyarakat desa.

4.4. KENDALA DAN SOLUSI KERJASAMA

Dalam melaksanakan kerjasama baik intern dan antar desa mengalami kendala dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kerjasama, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan kerjasama adalah kegiatan yang sia-sia/mustahil untuk dilaksanakan.

2. Masih rendahnya motivasi dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat kelompok, karena karakter masing-masing orang berbeda-beda seperti di kawasan transmigrasi yang masyarakatnya berasal dari berbagai daerah dengan suku dan etnis yang berbeda
3. Komitmen dari masing-masing anggota kelompok masih kurang disebabkan belum adanya ikatan secara formal (Naskah kerjasama/MoU) yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban dan sanksi bagi pihak yang tidak mentaati kesepakatan.
4. Kurangnya transparansi dalam kegiatan yang bersifat kelompok menyebabkan masyarakat mempunyai persepsi bahwa dalam kerjasama masyarakat hanya untuk dimanfaatkan dan belum mendapatkan manfaat.

Untuk mengatasi kendala tersebut sebelum dilakukan kerjasama baik intern maupun ekstern desa perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Penyusunan konsep kerjasama secara utuh dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak (desa-desa yang akan melakukan kerjasama) secara bersama-sama. Dalam menyusun konsep perlu mempertimbangkan 3 (tiga) hal yaitu apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, dan siapa yang akan melakukan. Apa yang dilakukan, Mengidentifikasi terhadap potensi desa/komoditas yang akan dikembangkan. Bagaimana melakukan, mengidentifikasi terhadap tahapan aktifitas usaha yang akan dilakukan dalam melaksanakan usahanya, hal ini penting untuk mengetahui jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Siapa yang melakukan, mengidentifikasi para pelaku yang sesuai dengan bidangnya. Kegiatan identifikasi ini dilakukan secara musyawarah dan dilakukan berkali-kali sampai mendapat kesepakatan dari berbagai pihak yang akan terlibat dalam kerjasama. Dalam konteks kerjasama antara Desa Karang Bunga dengan Desa Samuda yang akan mengembangkan Agroeduwisata perlu dipetakan potensi apa yang ada di masing-masing desa, kemudian bagaimana/langkah-langkah apa yang diperlukan agar pengembangan Agroedu-

wista tersebut dapat terwujud dan kelompok masyarakat dan lintas sector mana saja yang terlibat.

2. Sosialisasi konsep kerjasama kepada seluruh masyarakat dan lintas sektor agar mereka mengetahui dan memahami tentang tujuan, program dan kegiatan kerjasama yang akan dilakukan. Agar lebih meyakinkan, dalam sosialisasi perlu melibatkan tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan mempunyai keteladanan sehingga masyarakat akan mudah untuk mempercayai kerjasama tersebut.
3. Penyusunan naskah kerjasama/*MoU* yang isinya antara lain mengatur tentang tujuan dan maksud kerjasama, lingkup kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi dan waktu kerjasama.

5

STRATEGI PEMANFAATAN KERJASAMA SEBAGAI MODAL SOSIAL UNTUK MENDUKUNG REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

Dalam Bab ini akan dibahas tentang level kerjasama yang terjadi di kawasan transmigrasi KTM Cahaya Baru, khususnya Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana dan Desa Samuda Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dan strategi pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi.

5.1. LEVEL KERJASAMA DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka mencapai sasaran renstra bidang transmigrasi tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya perkembangan kawasan transmigrasi dari berkembang menuju mandiri dan berdaya saing, kegiatan kerjasama merupakan salah satu faktor penting. Adanya kerjasama dengan melibatkan berbagai sektor seperti kelompok masyarakat, swasta dan pemerintah (SKPD pusat dan daerah) akan mempermudah dan mempercepat terwujudnya peningkatan perkembangan kawasan transmigrasi. Hal ini diperkuat dengan hasil diskusi dengan informan yang menyebutkan bahwa kerjasama baik inter, antar desa dan dengan pihak ketiga secara tidak langsung akan mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Sebagai contoh adanya rencana pengembangan agroeduwisata yang melibatkan beberapa desa di Kecamatan Mandastana (Desa Karang Indah, Karang Buah dan Karang Dukuh)

dan Desa Samuda Kecamatan Belawang Kabupaten Batola, akan mendukung pengembangan kawasan transmigrasi Batola. Hal ini karena dengan agroeduwisata akan menarik masyarakat untuk datang ke desa-desa menikmati wisata yang ada tersebut. Semakin banyak orang yang datang ke desa akan menimbulkan kepercayaan baik bagi masyarakat sendiri, lintas sektor swasta maupun pemerintah. Rasa percaya ini merupakan modal bagi pihak yang terkait untuk menginvestasikan dan mengimplementasikan program-programnya ke desa-desa, dengan demikian desa-desa yang mendapat program-program tersebut akan cepat berkembang dan maju. Seperti desa Karang Bunga yang dahulunya (sebelum ada kerjasama) masuk kriteria desa tertinggal sekarang berubah menjadi maju bahkan pada tahun 2018 menjadi nominasi desa terbaik di Indonesia.

Dalam sub bab ini level kerjasama yang akan di bahas adalah sebagai berikut.

5.1.1. BONDING

Tahap bonding, dalam tahap ini kelompok-kelompok masyarakat masih fokus pada penguatan atau pengembangan usaha/kelompoknya, sehingga hubungan atau relasi dengan kelompok lainnya masih terbatas pada tingkat desa. Pada kasus 2 (dua) lokasi kajian (desa Karang Bunga dan Samuda) banyak ditemui kerjasama pada level ini yaitu (1) Kelompok petani dalam kegiatan sekolah lapangan masih fokus dalam peningkatan kapasitas kelompoknya dalam budidaya tanaman padi dan jeruk, (2) kelompok usaha wanita memperkuat usahanya dengan saling membantu pada pemasaran hasil dan saling menyediakan bahan untuk pengembangan usaha rangkaian bunga melati, (3) kelompok tani melakukan gotong royong untuk pengolahan lahan dan panen tanaman padi yang dilakukan secara bergantian (4) kelompok tani jeruk dalam penyetekan bibit jeruk masih untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya.

5.1.2. BRIDGING

Tahap *bridging*, tahap ini kelompok sudah mampu mempunyai relasi keluar untuk memperkuat kelompoknya, sehingga pada tahap ini kelompok masyarakat sudah membuka diri untuk menerima berbagai informasi dan teknologi. Dalam tahap ini kegiatan yang ditemui adalah: (1) Gapoktan Desa Samuda melakukan kerjasama dengan gapoktan Desa Murung Keramat dan Desa Karang Dukuh di wilayah Kecamatan Belawang dalam pengelolaan gudang padi untuk penyimpanan bibit, (2) kelompok usaha wanita dalam usaha pembuatan kue antar kelompok saling membantu dalam memasarkan hasil produksinya, (3) Kelompok karang taruna melakukan kerjasama dengan lembaga pemberdayaan Masyarakat dengan mengelola areal parkir di pasar desa hasilnya masih untuk pengembangan kelompoknya dan biaya operasional pasar.

5.1.3. LINKING

Tahap *linking*, tahap ini kelompok sudah dapat mengakses berbagai layanan seperti layanan permodalan, informasi, teknologi, inovasi dan adanya kedekatan kelompok/anggota kelompok terhadap layanan tersebut. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam kegiatan pertanian akan menjadi efektif jika dilakukan secara berkelompok dan kolektif. Pemanfaatan teknologi pertanian dan inovasinya disalurkan oleh Lembaga yang memberikan syarat bahwa pelaku pertanian harus berada dalam satu kelompok. Kelompok tersebut dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan ikatan kekeluargaan. Pada level ini kegiatan yang ditemui yaitu: (1) Kerjasama antara Bumdes Desa Karang Bunga dengan Bank BRI. Kerjasama ini terbentuk karena adanya warga masyarakat desa yang menjadi agen BRI link. Hal ini menggambarkan bahwa adanya kedekatan antara warga dengan pihak Bank BRI akan menimbulkan kepercayaan sehingga mempermudah akses untuk mendapatkan pinjaman modal usaha bagi petani dan pelaku usaha lainnya, (2) kerjasama antara kelompok rumah jeruk Karang Bunga

dengan Universitas Islam Kalimantan di Banjarmasin tentang pelatihan peningkatan kualitas produk jeruk dan turunannya. Dalam kerjasama ini kelompok rumah jeruk Desa Karang Bunga mendapatkan kemudahan untuk mengakses teknologi terutama teknologi pengolahan jeruk dan turunannya seperti sirup, *handsanitizer* dan es krim. Demikian juga untuk kerjasama antara kelompok usaha wanita dengan Dinas Perdagangan, mereka mendapatkan teknologi tentang pembuatan kue-kue kering. Adanya pelatihan akan meningkatkan keterampilan anggotanya dalam mengolah produk sehingga hasil kelompoknya akan mempunyai nilai tambah dan akan mampu bersaing untuk dipasarkan keluar daerah/wilayahnya. (3) Kerjasama antara rumah jeruk Desa Karang Bunga dengan STIMI dalam mengelola BUMDes, pada kerjasama ini kelompok rumah jeruk Karang Bunga mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi tentang pengelolaan bumdes yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa level kerjasama yang ada di 2 (dua) desa masih banyak pada level *bonding*, artinya kelompok yang terbentuk kegiatannya masih untuk memperkuat/pengembangan kelompoknya sendiri. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Junaidi (2012), desa transmigrasi memiliki modal sosial *bonding* yang tinggi, tetapi lemah dalam membangun modal sosial *bridging* sehingga tidak menghasilkan aksi kolektif yang menguntungkan sehingga memicu Kawasan eks transmigrasi yang bersifat *enclave*. Proses transfer keahlian dan kemampuan oleh transmigran cenderung tidak terjalin antara desa eks-transmigrai dengan wilayah sekitarnya sehingga tidak memberikan dampak pada perkembangan penduduk lokal (Bazzi et al., 2016). Sedangkan untuk level *bridging* masih rendah dikarenakan masyarakat masih memiliki kesibukan masing-masing, dan beberapa kelompok masih ingin mengembangkan kelompok sendiri. Sementara tahap *linking*, kerjasama yang terjadi lebih disebabkan karena adanya sinergitas program dari masing-masing pihak yang bekerjasama.

Dalam rangka mencapai tujuan revitalisasi kawasan transmigrasi yaitu meningkatnya status kawasan transmigrasi menjadi berdaya saing diperlukan jaringan yang lebih luas, agar para kelompok masyarakat di desa-desa di kawasan transmigrasi dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga diharapkan hasil produksi mereka dapat dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas baik di dalam kawasan, antar kawasan maupun antar wilayah. Untuk itu, kerjasama pada level linking perlu ditingkatkan dengan mengaktifasi modal-modal social yang ada di kawasan transmigrasi.

5.2. STRATEGI PEMANFAATAN KERJA SAMA ANTAR DESA SEBAGAI MODAL SOSIAL MENDUKUNG REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

Modal sosial merupakan modal yang penting dalam masyarakat karena membantu dalam mempercepat perkembangan kesejahteraan dan sosial, dan bukan milik eksklusif individu tetapi memiliki pengelompokan sosial yang berbeda sebagai karakteristik dari keseluruhan sistem sosial (Ibrahim et al., 2017). Ketika modal sosial dibangun dalam sosial, ada peluang positif untuk mengembangkan masyarakat disebabkan oleh perbaikan jaringan dan kecenderungan dalam ekonomi dan politik. Modal sosial yang berkembang di wilayah eks-transmigrasi dapat terlihat dari adanya kepercayaan antar masyarakat, norma di kehidupan masyarakat, dan jaringan yang tercipta di dalam hubungan sosial masyarakat. Masing-masing kategori tersebut menjelaskan bentuk dukungan yang dilakukan para anggota kelompok dengan ketua kelompoknya.

Dalam revitalisasi kawasan transmigrasi pemanfaatan modal sosial yang mencakup jaringan, kepercayaan dan norma menjadi hal perlu dikembangkan, karena modal sosial mampu menstimulir terbukanya modal-modal yang lain yang dibutuhkan dalam pembangunan kawasan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyusun arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan status perkembangan kawasan transmigrasi salah satunya adalah

peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan budaya untuk pembangunan perdesaan yang akan dicapai melalui 5 (lima) strategi yaitu (a) Memanfaatkan modal sosial dan budaya untuk peningkatan pembangunan kawasan transmigrasi, (b) Meningkatkan kapasitas modal sosial budaya masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal, (c) Pelibatan para pelaku budaya dan masyarakat dalam memanfaatkan modal sosial budaya masyarakat, (d) Meningkatkan kreativitas sosial budaya untuk pembangunan kawasan transmigrasi dan (e) Meningkatkan kerekatan sosial antar transmigran dan antara transmigran dengan penduduk lokal.

Dari 5 (lima) strategi yang dirancang tersebut belum semua dimanfaatkan secara baik. Kegiatan yang paling banyak dilaksanakan adalah terkait kerekatan sosial antar transmigran dan antara transmigran dengan penduduk lokal. Kegiatan yang dilakukan berupa melestarikan adat istiadat/tradisi masyarakat seperti peringatan hari jadi desa, peringatan hari besar keagamaan, tradisi syukuran menjelang dan setelah panen padi, mandi 7 (tujuh) bulanan dan mandi manten, gotong-royong dalam budidaya tanaman, saling bantu membantu jika ada tetangga yang kena musibah. Dalam acara tersebut masyarakat berbondong-bondong untuk datang tanpa memandang suku (penduduk pendatang atau penduduk lokal) mereka datang atas kesadaran sendiri dan rela berkorban baik moril maupun materiil untuk mendukung kegiatan tersebut. Sementara untuk strategi lainnya masih sangat sedikit ditemukan di kawasan transmigrasi. Untuk itu perlu disusun langkah-langkah pemanfaatan kerjasama sebagai modal sosial mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai berikut.

5.2.1. PEMETAAN BENTUK KERJASAMA

Setiap wilayah terutama kawasan transmigrasi memiliki karakteristik masing-masing dan berbeda-beda sehingga pemetaan perlu dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya alam dan Sosial. Dalam melakukan pemetaan ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu apa, bagaimana dan siapa.

Apa, terkait dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh dalam menentukan komoditas yang akan di kembangkan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Dalam musyawarah tersebut akan timbul kepercayaan satu sama lain dan norma yang berupa kesepakatan semua pihak yang akan menjadi ikatan dalam pelaksanaan. Bagaimana, yaitu bagaimana tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan awal yang dilaksanakan adalah mengkonsepkan kerjasama yang akan dilakukan, hal ini penting karena adanya konsep kelompok masyarakat yang akan melakukan kerjasama mengetahui, memahami dan menyetujui bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan, sehingga akan timbul kepercayaan dan norma yang berupa naskah kesepakatan. Siapa, dalam melakukan kerjasama perlu didukung oleh aktor-aktor dalam komunitas untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap aktor memainkan peran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama, sehingga membentuk jejaring yang saling menguatkan.

5.2.2. MENGAKTIVASI/MENGOPERASIONALKAN MODAL SOSIAL YANG ADA DI KAWASAN TRANSMIGRASI

5.2.2.1. DOKUMEN PERENCANAAN

Selama ini dalam dokumen perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi aktivitas kegiatan yang diakomodir lebih banyak pada bidang ekonomi, sarana prasarana, kelembagaan, lingkungan dan sosial budaya dalam arti pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan budaya dalam bentuk produk budaya seperti kesenian daerah (reog Ponorogo, jaran kepeng, tari-tarian dll). Sementara untuk modal sosial dan budaya masih belum menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan transmigrasi akibatnya pada tataran lapang aktivitas tersebut masih sedikit. Untuk itu dalam rangka memanfaatkan modal dalam revitalisasi kawasan transmigrasi permasalahan budaya

menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan yang di konkritkan dalam bentuk program dan kegiatan, hal ini karena modal sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal fisik, modal finansial, atau pun modal manusia. Modal sosial memiliki energi guna memperkuat kapasitas komunitas dalam mengembangkan usahanya.

5.2.2.2. PELATIHAN

Pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu strategi untuk mengaktivasi modal sosial yang ada di kawasan transmigrasi. Pelatihan dimaksudkan untuk menambah pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya modal sosial (relasi, kepercayaan dan norma) dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Pelatihan ini difokuskan pada pembentukan karakter masyarakat sehingga masyarakat mempunyai perilaku yang mendukung untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Beberapa karakter yang diperlukan masyarakat untuk melakukan kerjasama yaitu: (1) jujur, upaya menjadikan agar selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Adanya kepercayaan antara anggota kelompok masyarakat dengan ketua kelompoknya, demikian pula adanya saling percaya sesama anggota kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya akan menjadi perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok. Melalui kepercayaan orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif. (2) solidaritas, upaya untuk dapat menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan rela berkorban/ tolong-menolong untuk orang lain. Solidaritas timbul karena adanya perasaan senasib, mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai harapan yang sama. (3) disiplin, upaya untuk menunjukkan patuh terhadap berbagai ketentuan atau peraturan yang ada (norma). Norma terdiri dari pemahaman nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang (Komunitas). Norma dapat bersumber dari agama, Peraturan Daerah atau Peraturan Desa, Norma-norma dibangun dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama. Norma yang tidak tertulis dapat berupa tradisi atau adat istiadat yaitu tata kelakuan atau kebiasaan yang selalu ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Adat istiadat juga akan menjadi penuntun serta tata krama

bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya. (4) tanggungjawab, sikap untuk melaksanakan kegiatan (tugas dan kewajiban) yang harus diselesaikan baik untuk diri sendiri dan orang lain (masyarakat). Pada dasarnya setiap anggota kelompok masyarakat tidak mungkin dapat hidup secara individu. Oleh karena itu, mereka hidup dalam kelompok atau masyarakat. Hidup dalam kelompok tentu akan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Tanggung jawab sosial adalah kesadaran akan pribadi terhadap perilakunya di dalam masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial bagi kelompok masyarakat di desa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan kelembagaan kelompok.

Wawasan terhadap pembentukan karakter ini berlaku untuk pada semua level baik pada lapisan masyarakat, para pembuat perencana di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan Pusat. Apabila semua level sudah mempunyai karakter sebagaimana di atas maka kerjasama yang akan dilakukan akan berhasil dan berkesinambungan.

5.2.2.3. PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat dipercaya dan bekerjasama dalam mengelola program kegiatan (bantuan) yang diberikan baik oleh pemerintah maupun swasta. Selama ini kegiatan yang diberikan kepada masyarakat sebagian besar masih berorientasi proyek, artinya program/kegiatan yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada keberlanjutan program dan kurang berhasil. Adanya aktivasi modal social melalui pendampingan diharapkan pemberian bantuan terutama tentang teknologi tepat guna tidak diberikan secara instan tetapi perlu ada pemetaan kebutuhan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat dan pelaksanaannya dengan memanfaatkan kelompok masyarakat yang sudah terbentuk/ada dan bukan membentuk kelompok baru. Dengan demikian program yang diberikan akan berhasil dan masyarakat akan mendapat kepercayaan untuk melanjutkan program-program selanjutnya.

Kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh pendamping kawasan transmigrasi, pendamping desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). Para pendamping diharapkan mempunyai persepsi/memahami yang sama tentang bagaimana memanfaatkan modal social. Untuk itu perlu ada peningkatan kapasitas para pendamping terkait dengan menggerakkan modal social untuk pembangunan transmigrasi.

5.2.2.4. PENINGKATAN KREATIVITAS SOSIAL BUDAYA

Kreativitas sosial budaya dalam hal ini adalah budaya dalam memanfaatkan informasi dan teknologi untuk pengembangan komoditas unggulan. Masyarakat ditumbuhkan/dikenalkan dengan berbagai informasi dan teknologi. Pengenalan teknologi tidak serta merta menggunakan teknologi yang baru tetapi pengembangan teknologi yang sudah ada (konvensional) menjadi teknologi berbasis digital baik pada pelayanan publik, pemerintahan dan perdagangan. Sebagai contoh dalam konsep pengembangan smart village untuk pelayanannya semua menggunakan aplikasi teknologi. Dalam era digitalisasi ini jaringan/relasi, kepercayaan dan norma merupakan hal yang sangat penting. Sebagai contoh dalam pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi, yang kegiatannya dari hulu sampai hilir (produksi, pengolahan dan pemasaran) membutuhkan teknologi untuk pengolahan produksi, sedangkan untuk pemasaran hasil dibutuhkan jejaring dan norma untuk memperluas jaringan pasar dan menjaga kestabilan harga atau tidak terjadi dumping. Dalam penentuan jenis teknologi dan harga jual produksi tersebut diperlukan kepercayaan dan kesepakatan serta norma sebagai pengikat. Hasil penelitian Evi Fitriani dan Marni 2020, menyebutkan modal sosial merupakan hal penting dan sangat mempengaruhi tingkat peroduktivitas produk-produk pertanian pasca panen. Kolektivitas dalam perdagangan hasil pertanian sangat penting sebagai faktor yang mempengaruhi harga pasar. Kegiatan perdagangan hasil pertanian juga tidak terlepas dari ketersediaan jaringan. Sehingga modal sosial merupakan faktor penting dalam membuka jaringan antar pelaku pertanian dengan pihak lain yang berkepentingan dalam

kegiatan dan produk/hasil pertanian seperti Lembaga swasta maupun pemerintahan.

5.2.2.5. PELIBATAN PELAKU BUDAYA

Di kawasan transmigrasi banyak ditemui berbagai produk budaya, seperti kesenian reog Ponorogo, jaran kepeng, tari-tarian adat dan lain-lain. Selain itu juga terdapat budaya yang berupa makanan khas atau tradisional masing-masing daerah, dan tempat-tempat wisata yang mengandung nilai-nilai budaya. Produk budaya tersebut agar mempunyai nilai tambah perlu di lestarikan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkatkan perekonomian desa. Keunikan budaya lokal merupakan modal untuk meningkatkan daya saing kawasan.

6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

1. Kelompok masyarakat telah tumbuh di Desa Karang Bunga dan Samuda dengan kegiatan yang beragam. Pembentukan kelompok secara partisipasi dengan melibatkan seluruh elemen yang ada seperti tokoh masyarakat, aparat desa, kaum perempuan, pemuda dan masyarakat setempat dan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
2. Solidaritas masyarakat di dua desa cukup tinggi terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat melestarikan budaya lokal. Masyarakat datang dalam setiap acara tanpa memandang transmigran pendatang maupun lokal dan mereka datang atas kesadaran sendiri bahkan rela berkorban baik moril maupun materiil dalam kegiatan tersebut.
3. Kegiatan aksi dan kerjasama kolektif, semangat dan jiwa gotong-royong masyarakat cukup tinggi terutama untuk kegiatan pembangunan desa. Mereka rela tidak dibayar meskipun dalam APBDes tersedia anggaran untuk upah tenaga kerja. Upah kerja digunakan untuk perbaikan lingkungan.
4. Pada Desa Karang Bunga dan Samuda telah terjadi kerjasama inter desa dan antar desa maupun dengan pihak ketiga. Kerjasama yang ada masih dominan kerjasama antar kelompok dalam desa (inter

desa) dan kerjasama dengan pihak ketiga masih merupakan bentuk sinergitas program antara kedua belah pihak. Selanjutnya level kerjasama, *bonding* lebih banyak terjadi dibandingkan dengan *bridging* dan *linking*, sehingga level *linking* harus didorong dan dikembangkan karena untuk menjadikan kawasan transmigrasi berdaya saing diperlukan jaringan lebih luas (antar desa, antar kawasan, antar wilayah)

5. Kerjasama yang terjadi dikawasan transmigrasi, baik inter desa dan antar desa dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya satu sama lain/antar kelompok. Rasa percaya ini timbul karena adanya kebutuhan dan harapan bersama untuk meningkatkan usaha baik dalam budidaya tanaman pertanian maupun dalam usaha kecil masyarakat desa. Ketokohan dan kesamaan etnis merupakan faktor penting dalam menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kerjasama.
6. Kendala dalam melaksanakan Kerjasama:
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kerjasama, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan kerjasama adalah kegiatan yang sia-sia/mustahil untuk dilaksanakan.
 - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat kelompok, salah satunya karena karakter masing-masing orang berbeda-beda seperti di kawasan transmigrasi yang masyarakatnya berasal dari berbagai daerah dengan suku dan etnis yang berbeda
 - c. Kurangnya transparansi dalam kegiatan yang bersifat kelompok menyebabkan masyarakat mempunyai persepsi bahwa dalam kerjasama masyarakat hanya untuk dimanfaatkan dan belum mendapatkan manfaat.
 - d. Komitmen dari masing-masing anggota kelompok masih kurang disebabkan belum adanya ikatan secara formal (Naskah kerjasama/MoU) yang didalamnya memuat hak dan kewajiban dan sanksi bagi pihak yang tidak mentaati kesepakatan.
7. Strategi Pemanfaatan Modal Sosial Mendukung Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

a. Pemetaan Kebutuhan Kerjasama

Pemetaan dilakukan untuk untuk mengetahui potensi-potensi yang ada. Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam pemetaan kerjasama yaitu apa, bagaimana dan siapa. Apa, terkait dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagaimana, yaitu bagaimana tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Siapa, aktor-aktor dalam komunitas yang mendukung kerjasama. Output kegiatan pemetaan ini dijadikan bahan untuk mengkonsepkan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan.

b. Dokumen perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi

Selama ini dalam dokumen perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi kegiatan yang diakomodir lebih banyak pada bidang ekonomi, sarana prasarana, kelembagaan, lingkungan dan sosial budaya dalam arti pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan. Sementara untuk modal sosial dan budaya masih belum menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan transmigrasi akibatnya pada tataran lapang aktivitas tersebut masih sedikit. Untuk itu dalam rangka revitalisasi kawasan transmigrasi isu modal sosial dan budaya perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan yang dikonkritkan dalam bentuk program dan kegiatan, sehingga mudah dipahami oleh para pelaku di tingkat lapang.

c. Pelatihan

Pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu strategi untuk mengaktivasi modal sosial yang ada di kawasan transmigrasi. Pelatihan dimaksudkan untuk menambah pengetahuan/wawasan masyarakat terhadap pentingnya modal sosial (relasi, kepercayaan dan norma) dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Pelatihan ini difokuskan pada pembentukan karakter masyarakat sehingga masyarakat mempunyai perilaku jujur, solidaritas, disiplin dan tanggung jawab. Wawasan pembentukan

karakter ini mendukung masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

d. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat dipercaya dan bekerjasama dalam mengelola program kegiatan (bantuan) yang diberikan baik oleh pemerintah maupun swasta. Aktivasi modal sosial melalui pendampingan dapat diwujudkan dalam pemberian bantuan terutama tentang teknologi tepat guna. Bentuk teknologi yang diberikan merupakan hasil pemetaan kebutuhan yang sudah disepakati oleh masyarakat dan pemanfaatannya oleh kelompok masyarakat yang sudah terbentuk/ada, bukan membentuk kelompok baru. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh pendamping kawasan transmigrasi, pendamping desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM).

e. Peningkatan kreativitas sosial budaya

Kreativitas sosial budaya dalam hal ini adalah budaya dalam memanfaatkan informasi dan teknologi untuk pengembangan komoditas unggulan. Jaringan/relasi, kepercayaan dan norma merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas produk-produk pertanian pasca panen. Kolektivitas dalam perdagangan hasil pertanian sangat penting sebagai faktor yang mempengaruhi harga pasar. Kegiatan perdagangan hasil pertanian juga tidak terlepas dari ketersediaan jaringan. Sehingga modal sosial merupakan faktor penting dalam membuka jaringan antar pelaku pertanian dengan pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan dan produk/hasil pertanian seperti Lembaga swasta maupun pemerintahan.

f. Pelibatan pelaku budaya

Di kawasan transmigrasi banyak ditemui berbagai produk budaya, seperti kesenian reog Ponorogo, jaran kepeng, tari-tarian adat dan lain-lain. Selain itu juga terdapat budaya yang berupa makanan khas atau tradisional masing-masing daerah, dan tempat-tem-

pat wisata yang mengandung nilai-nilai budaya. Produk budaya tersebut agar mempunyai nilai tambah perlu di lestarikan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkatkan perekonomian desa. Keunikan budaya lokal merupakan modal untuk meningkatkan daya saing kawasan.

6.2. REKOMENDASI

1. Para perencana baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyusun rencana pembangunnn kawasan perlu mempertimbangkan isu modal sosial yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan.
2. Penempatan pendamping kawasan transmigrasi yang tugasnya tidak hanya pendampingan dalam bidang ekonomi dan sarana prasarana (pembangunan fisik) tetapi juga untuk memanfaatkan modal sosial yang ada di desa/kawasan.
3. Peningkatan kapasitas para perencana dan para pendamping (Pengerak Swadaya Masyarakat dan Pendamping kawasan transmigrasi) agar ada kesepahaman bersama dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal sosial yang ada di desa/kawasan untuk revitalisasi kawasan transmigrasi melalui pelatihan/bimtek.
4. Pelatihan kepada kelompok masyarakat yang ada di desa untuk menambah pengetahuan/wawasan masyarakat terhadap pentingnya modal sosial (relasi, kepercayaan dan norma) dalam pembangunan kawasan transmigrasi dan pembentukan karakter masyarakat (jujur, solidaritas, disiplin dan tanggung jawab) sehingga masyarakat mempunyai perilaku yang mendukung untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
5. Perlu dikembangkan digital trust yang tidak hanya pada orientasi pelayan publik dan pemerintahan tetapi juga pada sektor perdagangan/*e-commerce*, agar produk yang dihasilkan dapat terhubung ke jangkauan yang lebih luas.

6. Perlu advokasi kepada para pelaku budaya di kawasan transmigrasi, agar mereka memahami bahwa keunikan budaya lokal merupakan modal untuk meningkatkan daya saing kawasan transmigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Purbantara, A., dkk. 2019. *Pengembangan Teknik Pemasaran Kopi Melalui Branding. Pusat penelitian dan Pengembangan. Kementerian Desa PDDT. Jakarta.*
- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.*
- Fitriana, Evi, dan Marni. 2021. *Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau.* <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio/article/view/8771>
- Suharto. 2005.
- Doh, Soogwan dan Zoltan J. Acs. 2009. *Innovation and Social Capital: A Cross-country Investigation.*
- Djohan, Robby. 2007. *Lead to Togetherness.* Edisi ke-1. Jakarta (ID): Fund Asia Education.
- Danisworo. 2002. *Sejarah, Makna, dan Keunikan Tempat.*
- Djoko Pugh Wibowo, 2017. Rencana Pembelajaran kerjasama Antar desa (KSAD). *Makalah.* KKN Tematik Mahasiswa Fakultas Geografi UGM, 23-24 Mei 2017 di Yogyakarta.
- Laretna, Adishakti. 2002. Revitalisasi Bukan Sekedar “Beautification”. *Urdu.* Vol.13, www.urdu.org (Urban and Regional Development Institute)
- Kementerian Pertanian. 2020. *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah.*
- Nur Ariyanto. 2020. *Modul Kerjasama Desa di Kawasan Hutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.*
- Putnam, R.D. 1995. Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. *Journal of Democracy.* 6 (1): 65-78.
- Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. h.*

- Pranadji, Tri. 2006. Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering. Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 24 No.2, Oktober 2006 : 178-206.
- Robert M.Z. Lawang. 2005. Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Indonesia
- Renstra Pembangunan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2020-2024. *Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans)*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
- Saharudin. 2000. Modal Sosial Organisasi Akar Rumput: Suatu Studi atas lembaga Kesehatan Lokal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Tesis*. Program Magister Sosiologi – FISIP Universitas Indonesia.
- Saraswati Soegiharto dan Arif Purbantara. 2020. *Modul Pengkajian Keadaan Desa Hutan: Teknik Identifikasi Lima Modal*. Pusat Penelitian dan Pengembangan. Balilafpo, Kemendesa PDTT.
- Ernan Rustiadi dkk (Ed). *Kawasan agropolitan konsep pembangunan desa-kota berimbang* (pp. 73-81). Bogor: Crespent Press.
- Syahyuti. 2021. *Materi presentasi Masukan untuk proposal riset kajian pengembangan food estate melalui transmigrasi mendukung ketahanan pangan nasional*. Jakarta, 25 Mei 2021. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendesa PDTT.
- Tim Pengembangan Food Estate. 2010. *Buku pintar food estate*. Jakarta: Departemen Pertanian
- Vipriyanti, Nyoman Utari. (2011). *Modal sosial dan pembangunan wilayah mengkaji success story pembangunan di Bali*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Xu, Jennifer, Michael Chau, Bernard C. Y. Tan (2014). The Development of Social Capital in the Collaboration Network of Information Systems. *Journal of the Association for Information Systems* Vol. 15, Issue 12, pp. 835-859, December 2014.
- Yuliani, Dewi (2021). *Materi presentasi Program ketahanan pangan di kawasan transmigrasi*. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya, Ditjen Pengembangan kawasan transmigrasi
- Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendesa PDTT Tahun 2020 – 2024.
- UU No. 29 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigran.
- Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 29 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997.

*Intellectual Wisdom
for Smart Policies*



www.kemendes.go.id 
pusbangjak@gmail.com 
[@pusbangjak_kemendes](https://www.instagram.com/pusbangjak_kemendes) 
[@Pusbangjak](https://twitter.com/Pusbangjak) 
[PUSBANGJAK_KDPDTT](https://www.facebook.com/PUSBANGJAK_KDPDTT) 

Kementerian Desa, PDTT 
Gedung A Lt.1 Sayap Selatan
Jl. TMP Kalibata No.17
Pancoran, Jakarta Selatan